



**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN TEKANAN
STAKEHOLDER TERHADAP PRAKTIK
PENGUNGKAPAN *SUSTAINABILITY REPORT*
DENGAN PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

(Studi Empiris pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Dwi Riani Ayu Ndari

7211416168

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke panitia sidang ujian skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Agustus 2020



Menyetujui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Kuswanto, S.E., M.Si., CMA, CIBA, CERA
NIP. 198309012008121002

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si
NIP. 197510101999031001

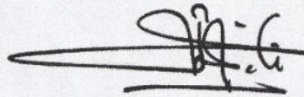
PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

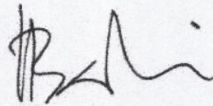
Tanggal : 2 September 2020

Penguji I



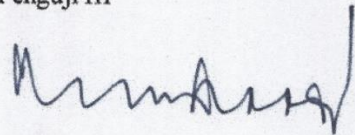
Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D.
NIP. 196307181987021001

Penguji II



Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP. 198501152010122004

Penguji III



Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si.
NIP. 197510101999031001



Mengetahui,
Dean Fakultas Ekonomi

Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D.
NIP. 196307181987021001


PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Riani Ayu Ndari
NIM : 7211416168
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 02 Februari 1998
Alamat : Dusun Karang, Desa Kebonagung RT 07 RW
02, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten
Magelang, Jawa tengah

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Temuan atau pendapat orang lain dalam skripsi ini dirujuk atau dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 13 Agustus 2020



Dwi Riani Ayu Ndari

NIM. 7211416168

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(QS. Al-Baqarah:286)

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ◆ Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Iriyanto dan Ibu Yahini
- ◆ Kedua kakakku, Aristya Wulandari dan Galih Wicaksana serta keponakan tersayang, Callista Assyabiya Wicaksana
- ◆ Sahabat-sahabatku, Ekayanti, Ari Fitrianingrum, Yunia Sita Handayani, Shinta Maharani Ardiyan, Zahrotus Sholikhah, Larassanti Kusumosari, dan Pracita Netta Iswari
- ◆ Keluarga besar Akuntansi B 2016
- ◆ Almamaterku, Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pengaruh Kinerja Keuangan dan Tekanan *Stakeholder* terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report* dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating**”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi UNNES.
3. Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNNES.
4. Dr. Muhammad Khafid, S.Pd. M.Si., dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi dan memberi saran kepada Penulis.
5. Hasan Mukhibad, S.E.,M.Si., dosen wali Akuntansi B 2016 yang telah membimbing dan mendampingi Penulis dari awal hingga akhir studi di Universitas Negeri Semarang.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

7. Keluarga besar Universitas Negeri Semarang atas segala bantuan dan dukungannya dalam menyelesaikan studi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Semarang, 13 Agustus 2020

Penyusun

SARI

Ndari, Dwi Riani Ayu. 2020. “Pengaruh Kinerja keuangan dan Tekanan *Stakeholder* terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report* dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Muhammad Khafid, S.Pd. M.Si.

Kata kunci : *Sustainability Report*, Kinerja Keuangan, Tekanan *Stakeholder*, Komisaris Independen.

Sejak berkembangnya isu mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Sustainability*, kegiatan pengelolaan perusahaan tidak hanya berdasarkan pada aspek ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut dapat diwujudkan melalui pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk *sustainability report* sebagai laporan sukarela yang disajikan secara terpisah dari *annual report*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, *Consumer-Proximity Industry*, *Employee-Oriented Industry*, *Environmentally Sensitive Industry*, dan *Investor-Oriented Industry* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* dengan proporsi komisaris independen sebagai variabel moderating.

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan *sustainability report* secara terpisah dari *annual report* selama tahun 2016-2018. Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga didapat unit analisis akhir sebanyak 106 data. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi moderasi dengan uji nilai selisih mutlak menggunakan alat bantu *statistical package for the social sciences* (SPSS) 23.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dan *Investor-Oriented Industry* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* sedangkan profitabilitas, *Consumer-Proximity Industry*, *Employee-Oriented Industry*, *Environmentally Sensitive Industry* tidak berpengaruh terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*. Selain itu, hasil juga menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen mampu memoderasi pengaruh *Environmentally Sensitive Industry* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* namun tidak mampu memoderasi pengaruh *Consumer-Proximity Industry*, *Employee-Oriented Industry*, dan *Investor-Oriented Industry* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan penelitian ini, perusahaan diharapkan dapat melakukan publikasi *sustainability report* secara terpisah dari *annual report* serta meningkatkan pengungkapan informasi didalamnya. Kemudian, peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan pengukuran lain untuk menilai praktik pengungkapan *sustainability report* serta menambah variabel lain mengingat pengaruh yang diberikan variabel independen dalam penelitian ini masih rendah.

ABSTRACT

Ndari, Dwi Riani Ayu. 2020. "The Effect of Financial Performance and Stakeholders' Pressure on Sustainability Report Disclosure Practice with Proportion of Independent Commissioners as a Moderating Variable". Final Project. Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor: Dr. Muhammad Khafid, S.Pd. M.Si.

Keywords: Sustainability Report, Financial Performance, Stakeholder Pressure, Independent Commissioners

Since the issue of corporate social responsibility (CSR) and sustainability, corporate management activities is not only based on the economic aspect, but it will also consider the aspect of social and environmental. Those three aspects can be implemented through the disclosure of social and environmental responsibility in the form of sustainability report as the voluntary report that is served separately from annual report. The purpose of this research is examine the effect of profitability, leverage, consumer-proximity industry, employee-oriented industry, environmentally sensitive industry, and investor-oriented industry towards sustainability report disclosure practices with the proportion of independent commissioner as variable moderating.

The population in this research are registered companies in Indonesian stock exchange that publish sustainability report separately from annual report during the period of 2016-2018. The sample of this research is obtained by using purposive sampling method until they reached the final analysis unit as many as 106 data. This research uses documentation technique for collecting data. The analysis technique used was regression analysis moderation by testing the value of the differences in absolute with SPSS version 23.

The result showed that leverage and investor-oriented industry influence positively and significantly to the practice of disclosure sustainability report while, profitability consumer-proximity, industry employee-oriented, industry environmentally sensitive industry do not affect sustainability report. The result also shows that the proportion of independent commissioner can moderate the influence of *Environmentally Sensitive Industry* on the *sustainability report*, but it can not moderate the influence of *Consumer-Proximity Industry*, employee-oriented industry, investor-oriented industry on sustainability report disclosure.

Based on this study, the company is expected to do a publication sustainability report separately from the annual report and the information in it. Then, the measurements and other researchers expected use to judge the sustainability report practices and add other variables remember a given influence an independent variable in research is still low.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KELULUSAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	14
1.3. Cakupan Masalah.....	15
1.4. Perumusan Masalah	16
1.5. Tujuan Penelitian	18
1.6. Manfaat Penelitian	19
1.7. Orisinalitas Penelitian	21
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN	22
2.1. Kajian Teori Utama.....	22
2.1.1. Teori Stakeholder	22
2.1.2. Teori Legitimasi	24
2.1.3. Teori Agensi.....	26
2.2. Kajian Variabel Penelitian	28
2.2.1. Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	28
2.2.2. Kinerja Keuangan.....	44

2.2.3. Tekanan <i>Stakeholder</i>	51
2.2.4. Proporsi Komisaris Independen	60
2.3. Kajian Penelitian Terdahulu	63
2.4. Kerangka Berpikir.....	77
2.4.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	77
2.4.2. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability</i> <i>Report</i>	79
2.4.3. Pengaruh <i>Customer Proximity Industries</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	82
2.4.4. Pengaruh <i>Employee-Oriented Industries</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	84
2.4.5. Pengaruh <i>Environmentally Sensitive Industries</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	87
2.4.6. Pengaruh <i>Investor-Oriented Industries</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	89
2.4.7. Peran Proporsi Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh <i>Customer Proximity Industries</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	91
2.4.8. Peran Proporsi Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh <i>Employee-Oriented Industries</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	94
2.4.9. Peran Proporsi Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh <i>Environmentally Sensitive Industries</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	97
2.4.10. Peran Proporsi Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh <i>Investor-Oriented Industries</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	99
2.5. Hipotesis Penelitian	103
BAB III : METODE PENELITIAN.....	105
3.1. Jenis dan Desain Penelitian.....	105
3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	105
3.3. Variabel Penelitian.....	106
3.3.1. Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	106

3.3.2. Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	107
3.3.3. Variabel Moderating (<i>Moderating Variable</i>)	107
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	113
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	113
3.5.1. Analisis Data Statistik Deskriptif.....	113
3.5.2. Analisis Data Statistik Inferensial.....	114
BAB IV : ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	120
4.1. Hasil Penelitian	120
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	120
4.1.2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	120
4.1.3. Hasil Analisis Statistik Inferensial	1288
4.2. Pembahasan.....	142
4.2.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	142
4.2.2. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	145
4.2.3. Pengaruh <i>Costumer-Proximity Industry</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	148
4.2.4. Pengaruh <i>Employee-Oriented Industry</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	150
4.2.5. Pengaruh <i>Environmentally Sensitive Industry</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	153
4.2.6. Pengaruh <i>Investor-Oriented Industry</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	155
4.2.7. Peran Proporsi Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh <i>Consumer-Proximity Industry</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	157
4.2.8. Peran Proporsi Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh <i>Employee-Oriented Industry</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	160
4.2.9. Peran Proporsi Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh <i>Environmentally Sensitive Industry</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	163

4.2.10. Peran Proporsi Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh <i>Investor-Oriented Industry</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	166
BAB V : PENUTUP	169
5.1 Simpulan	169
5.2 Saran	170
DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN.....	179

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	69
Tabel 3.1. Pemilihan Sampel Penelitian	106
Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel	111
Tabel 4.1. Analisis Statistik Deskriptif	121
Tabel 4.2. Distribusi <i>Frequency</i> Variabel <i>Costumer-Proximity Industry</i>	122
Tabel 4.3. Distribusi <i>Frequency</i> Variabel <i>Environmentally Sensitive Industry</i>	122
Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas	129
Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinieritas 1	130
Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinieritas 2	130
Tabel 4.7. Hasil Uji Autokorelasi (Uji <i>Run Test</i>)	131
Tabel 4.8. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser).....	132
Tabel 4.9. Hasil Analisis Regresi Moderasi (Uji Nilai Selisih Mutlak)	133
Tabel 4.10. Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F)	137
Tabel 4.11. Simpulan Hipotesis Penelitian	140
Tabel 4.12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Infografis Lembaga Jasa Keuangan dan Emiten Penerbit <i>Sustainability Report</i>	6
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	102
Gambar 4.1. Model Hasil Penelitian	136

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Perusahaan Sampel Penelitian.....	179
Lampiran 2	Indikator Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> GRI G4	181
Lampiran 3	Indikator Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> GRI Standard	188
Lampiran 4	Hasil Tabulasi Data Penelitian	192
Lampiran 5	Analisis Statistik Deskriptif.....	195
Lampiran 6	Hasil Distribusi <i>Frequency</i>	197
Lampiran 7	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	198
Lampiran 8	Hasil Uji Hipotesis (Uji Nilai Selisih Mutlak)	201
Lampiran 9	Hasil Koefisien Determinasi.....	202

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, setiap operasi bisnis yang dijalankan perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan laba serta meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham (*shareholder*). Karena keberpihakannya kepada para pemilik modal tersebut, perusahaan sering kali melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat (sosial) secara tak terkendali sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan manusia (Anggraini, 2006). Berbagai perdebatan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis perusahaan pun mulai bermunculan sehingga mengakibatkan tekanan yang tinggi pada perusahaan.

Sejak berkembangnya isu mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Sustainability*, kegiatan pengelolaan perusahaan tidak hanya berdasarkan pada aspek ekonomi tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan (Sulistiyawati & Qadriatin, 2018). Namun survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI 2014) membuktikan bahwa korporasi menempati posisi tertinggi sebagai pelaku kerusakan dan pencemaran lingkungan (Solikhah dan Winarsih, 2016). Sebagai contoh yaitu kasus kebakaran hutan di Riau yang dilakukan oleh PT Sumber Sawit Sejahtera (kompas.com), kasus pencemaran limbah B3 logam berat di Bekasi oleh PT Nirmala Tipar Sesama (tribunnews.com),

serta kasus pencemaran sungai Daerah Aliran Sungai Citarum oleh PT Kamarga Kurnia Textile Industry (jabarekspres.com). Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia belum menerapkan prinsip CSR secara baik dan konsisten.

Selanjutnya, kasus kerusakan lingkungan juga terjadi di Kabupaten Mimika, Papua akibat pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport (Dewi, 2019; Hardika *et al*, 2018; Solikhah dan Kuswoyo, 2019; serta Susanti dan Alvita, 2019). Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT Freeport terbukti melakukan 48 pelanggaran terkait lingkungan yang sebagian besar berkaitan dengan limbah atau *tailing* pertambangan. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan bahwa PT Freeport telah menggunakan hutan lindung seluas 4.535,93 hektar tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari KLHK serta melakukan pembuangan limbah yang mengakibatkan kerusakan ekosistem senilai Rp 185 triliun. Kerusakan lingkungan terjadi karena tidak layakannya penampungan *tailing* di sepanjang Sungai Ajkwa, Kabupaten Mimika, Papua dimana pada area hulu kerugian lingkungan diperkirakan mencapai Rp 10,7 triliun dan di area muara mencapai Rp 8,2 triliun. Sedangkan kerugian yang terbesar yaitu di Laut Arafura yang mencapai Rp 166 triliun. Pelanggaran ini terjadi karena area penampungan *tailing* yang dibatasi hanya 230 kilometer persegi di wilayah hulu meluas hingga ke muara sungai (Tempo.co).

Selain itu, kasus kerusakan lingkungan akibat sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik juga menjadi perhatian dunia akhir-akhir ini. Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa rata-rata jumlah sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/tahun. Adanya data tersebut mendorong perusahaan-perusahaan multinasional menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan penggunaan plastik. Namun berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *Greenpeace* Amerika Serikat (2019), kebijakan tersebut dianggap sebagai solusi palsu karena konsep isi ulang (*refill*) dan penggunaan kembali (*reuse*) tidak dijalankan. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan multinasional Nestle dimana mereka menerapkan kebijakan untuk mengganti sedotan plastik dengan sedotan yang berbahan dasar kertas. Kebijakan tersebut dinilai tidak memberikan solusi terbaik karena akan mengakibatkan permasalahan lingkungan yang lain yaitu deforestasi yang akan mengancam keberlangsungan kebutuhan generasi mendatang.

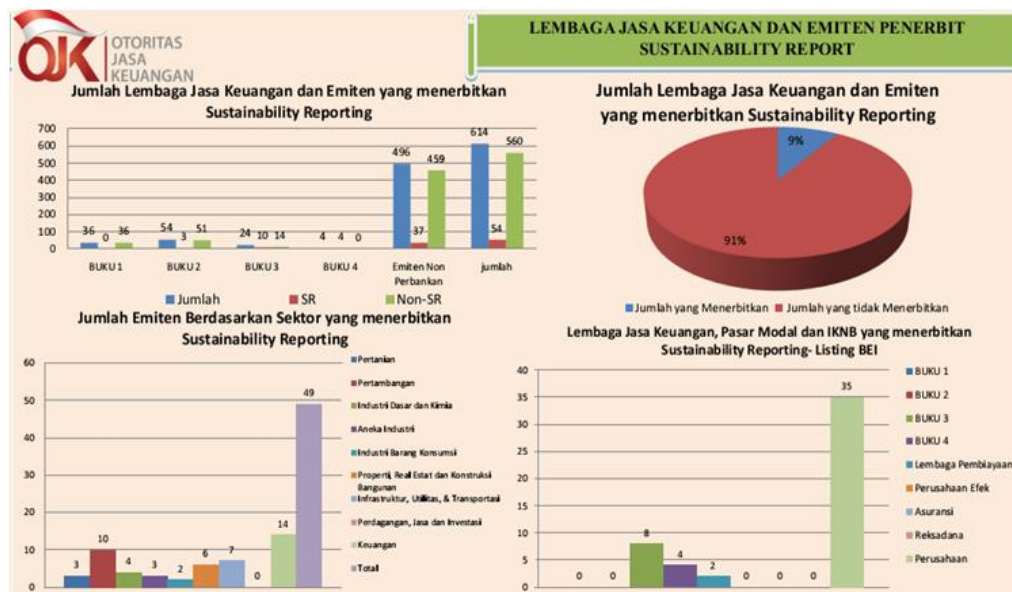
Dalam buku *Cannibal With Forks*, John Elkington (1994) mengemukakan bahwa seiring berkembangnya zaman konsep memaksimalkan laba mulai bergeser dan berubah menjadi konsep *triple bottom line* atau 3P (*profit people, planet*). Adanya prinsip 3P ini menjadi pilar utama bagi perusahaan agar dalam berbisnis tidak hanya mengejar keuntungan *financial* (*profit*) saja tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*people*) serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) (Madona, 2019). Berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia memberikan tanda bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan yang kurang peduli atas kerugian yang ditimbulkan dari

aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan saat ini semakin mendapat perhatian lebih dari berbagai kelompok kepentingan masyarakat. Perusahaan dituntut tidak hanya menerbitkan laporan keuangan saja tetapi juga mengungkapkan kepedulian sosial dan lingkungannya (Sulistyawati & Qadriatin, 2018). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana pada Pasal 74 ayat 1 berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang adalah dengan melakukan pembangunan berkelanjutan “*sustainable development*”. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tidak menghabiskan modal yang disediakan oleh alam. Untuk itulah transparansi atas informasi perusahaan menjadi sangat penting untuk para pemangku kepentingan agar dampak dari aktivitas yang dilakukan perusahaan dapat diketahui secara luas. Informasi mengenai dampak aktivitas ekonomi, sosial dan lingkungan tersebut dapat diungkapkan melalui *sustainability report* sebagai laporan sukarela yang disajikan secara terpisah dari *annual report* (Idah, 2013). Pengertian *sustainability report* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Pasal 1 adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Dalam hal ini, *Global*

Reporting Initiative (GRI) merupakan organisasi standar internasional yang berpusat di Amsterdam, Belanda yang aktivitas utamanya adalah menyediakan dan mengembangkan kerangka kerja untuk pelaporan keberlanjutan suatu perusahaan. Pedoman dari GRI ini banyak digunakan oleh organisasi atau perusahaan di seluruh negara.

Di berbagai negara maju di kawasan Eropa, *sustainability report* merupakan laporan yang wajib dibuat oleh perusahaan, baik itu perusahaan swasta atau perusahaan milik negara (News Unika, 2019). Berdasarkan *Environmental Performance Index* (EPI) tahun 2018, negara-negara tersebut bahkan memiliki nilai dan peringkat yang tinggi. Sedangkan Indonesia masih menempati peringkat ke 133 dari 180 negara anggota EPI yang menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat dikategorikan sebagai negara yang ramah lingkungan. Kemudian data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 dalam Gambar 1.1. juga menunjukkan bahwa publikasi *sustainability report* di Indonesia masih tergolong rendah.



Gambar 1.1. Infografis Lembaga Jasa Keuangan dan Emiten Penerbit Sustainability Report

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Dari Gambar 1.1. dapat diketahui bahwa di akhir tahun 2016 jumlah perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* secara terpisah dari *annual report* hanya sebesar 9% dari total perusahaan yang *listing* di BEI. Sektor tertinggi penerbit laporan keberlanjutan adalah sektor keuangan dengan total 14 perusahaan dan kemudian disusul oleh sektor pertambangan sebanyak 10 perusahaan dan sektor transportasi sebanyak 7 perusahaan. Minimnya kesadaran perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan menjadi faktor utama penyebab rendahnya jumlah perusahaan yang melakukan publikasi *sustainability report*.

Pengungkapan *sustainability report* diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi juga tetap bertanggung jawab terhadap kesejahteraan

masyarakat dan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas perusahaan untuk pembangunan berkelanjutan jangka panjang (Madona, 2019). Selain itu, adanya *sustainability report* juga dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan serta komunikasi dengan para *stakeholder*, melindungi nama baik (reputasi) perusahaan, analisa investasi bagi investor, serta menghasilkan daya saing yang tinggi dalam perolehan kapital/pinjaman, SDM, dan pemasok (Barung *et al.*, 2018). Sejak tahun 2017 lalu, pemerintah melalui OJK mengeluarkan sebuah peraturan baru dimana beberapa perusahaan diwajibkan untuk membuat *sustainability report*. Hal ini dilakukan sebagai bentuk mewujudkan komitmen dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan tanpa mengurangi kepercayaan dari investor serta akan membantu perusahaan dalam memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Berkembangnya isu mengenai pelaporan berkelanjutan di Indonesia tidak terlepas dari peran *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR) yang merupakan organisasi independen pertama yang mengembangkan pelaporan berkelanjutan di Indonesia. Pada tahun 2005-2007, NCSR aktif dalam memperkenalkan dan menyebarluaskan laporan keberlanjutan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia dan sejak tahun 2005 NCSR mulai mengadakan *Sustainability Reporting Awards* (SRA) yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali. Namun mulai tahun 2018, SRA berubah menjadi *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRR) yang dapat dihadiri oleh perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Hingga saat ini laporan keberlanjutan di Indonesia masih bersifat *voluntary*, namun perkembangannya menunjukkan tren yang positif dari tahun ke

tahun meskipun masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan total perusahaan yang terdaftar di BEI. Rendahnya pengungkapan *sustainability report* di Indonesia diakibatkan karena tidak adanya *single definition* dari *sustainability report* yang mampu diterima secara global, atau bagaimana seharusnya bentuk format dari *sustainability report* (Dilling, 2010). Sedangkan Nurhayati *et al.* (2006) menyatakan bahwa rendahnya pengungkapan *sustainability report* disebabkan oleh fakta bahwa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tidak menggunakan pengungkapan informasi lingkungan sebagai salah satu persyaratan wajib di BEI.

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang permasalahan *sustainability report* telah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lucia dan Panggabean (2018) yang meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan, dewan direksi dan komite audit terhadap *sustainability report*. Sinaga dan Fachrurrozie (2017) menguji pengaruh profitabilitas, rasio aktivitas, tipe industri, komite audit, dewan direksi dan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*. Fernandez-Feijoo *et al.*, (2014) meneliti pengaruh tekanan *stakeholder* terhadap transparansi *sustainability report* yang diprosikan ke dalam empat variabel independen yaitu industri dekat pelanggan, industri berorientasi karyawan, industri sensitif lingkungan dan industri berorientasi pada investor. Selain itu Rudyanto dan Siregar (2018) juga menguji pengaruh tekanan *stakeholder*, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, efektivitas dewan komisaris dan kepemilikan keluarga terhadap kualitas *sustainability report*. Alfaiz dan Aryati (2019) juga meneliti pengaruh tekanan

stakeholder dan profitabilitas terhadap kualitas *sustainability report* dengan menambahkan komite audit sebagai variabel moderasi.

Aniktia dan Khafid (2015) menguji pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, *governance commite*, profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan *sustainability report*. Selain itu, Diono dan Prabowo (2017) meneliti pengaruh ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komposisi dewan komisaris wanita, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kualitas *sustainability reporting*. Pratama dan Yulianto (2015) meneliti pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dewan komisaris, *governance commite*, dan komite audit terhadap *sustainability report*.

Pada dasarnya, faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan *sustainability report* terbagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal (Rokhimah, 2018). Faktor internal meliputi ukuran perusahaan, tipe industri, struktur kepemilikan, *corporate governance*, kinerja keuangan, rasio aktivitas, pertumbuhan perusahaan sedangkan faktor eksternal dapat berupa regulasi pemerintah, kondisi perekonomian nasional, permasalahan lingkungan dan kondisi infrastruktur. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh positif, beberapa menunjukkan hasil yang negatif dan terdapat beberapa penelitian yang lain menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali. Adanya *research gap* tersebut memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian kembali terkait profitabilitas, *leverage*, dan tekanan *stakeholder* serta pengaruhnya terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*.

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham (Alfaiz dan Aryati, 2019). Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi akan memiliki kinerja keuangan yang kuat sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Aniktia dan Khafid, 2015). Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang wajib diungkapkan dalam *sustainability report*. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*. Penelitian yang dilakukan oleh Diono dan Prabowo, (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marwati dan Yulianti (2015), Pratama dan Yulianto (2015), serta Rudyanto dan Siregar (2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alfaiz dan Aryati (2019), Aniktia dan Khafid (2015), Saputro *et al.* (2013) serta Sinaga dan Fachrurrozie (2017) menunjukkan hasil yang sebaliknya dimana profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*.

Leverage merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan suatu perusahaan. Rasio *leverage* menunjukkan proporsi total hutang terhadap aset atau ekuitas pemegang saham sehingga akan memberikan gambaran mengenai risiko tak tertagihnya suatu hutang. Ketika tingkat *leverage* tinggi, manajer akan berusaha mengalihkan perhatian *stakeholder* dengan cara memperbanyak pengungkapan informasi terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Selain untuk menunjukkan bagaimana dana perusahaan digunakan,

pengungkapan dalam bentuk *sustainability report* juga menjadi sarana bagi manajer untuk memperbaiki citra perusahaan di hadapan para pemilik modal dan pemberi pinjaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Afsari *et al.* (2017) dan Rudyanto dan Siregar (2018) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aniktia dan Khafid (2015) menunjukkan hasil yang berlawanan dimana *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Namun penelitian yang dilakukan Khafid dan Mulyaningsih (2015) dan Saputro *et al.* (2013) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Stakeholder merupakan seseorang, kelompok atau organisasi yang memiliki keterkaitan atau hubungan tertentu dengan organisasi (Rudyanto dan Siregar, 2018). Tanpa adanya dukungan dari pemangku kepentingan, perusahaan tidak dapat menjalankan usahanya. Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) menyatakan bahwa setiap industri atau perusahaan memiliki pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Namun para pemangku kepentingan tersebut memiliki tuntutan yang sama agar pelaksanaan dan pengkomunikasian tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diungkapkan dan diketahui secara luas. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai tekanan pemangku kepentingan. Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) mengklasifikasikan tekanan *stakeholder* ke dalam empat kelompok utama (*primary stakeholder*) yang terdiri dari *Customer-Proximity Industry/CPI* (industri dekat pelanggan), *Employee-Oriented Industry/EOI* (industri berorientasi karyawan),

Environmentally Sensitive Industry/ESI (industri sensitif lingkungan) dan *Investor-Oriented Industry/IOI* (industri berorientasi pada investor) kemudian meneliti pengaruhnya terhadap transparansi *sustainability report*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat kelompok tekanan *stakeholder* tersebut memiliki pengaruh positif terhadap transparansi *sustainability report*. Industri berorientasi investor dan pekerja memiliki pengaruh yang paling tinggi sedangkan industri sensitif lingkungan memiliki pengaruh yang paling rendah.

Perusahaan yang memiliki tekanan yang tinggi dari investornya akan cenderung untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*. Hal ini dikarenakan adanya tekanan dari pasar modal yang memaksa perusahaan untuk meningkatkan transparansi informasi. Begitu pula perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang tinggi, maka tekanan dari karyawan agar perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan pun juga semakin tinggi. Saat ini banyak karyawan ataupun calon karyawan yang berkualitas dan mereka akan melihat apakah perusahaan tempatnya bekerja merupakan perusahaan yang bertanggungjawab atau tidak (Alfaiz dan Aryati, 2019). Hal ini yang kemudian menuntut manajemen untuk lebih meningkatkan pengungkapan *sustainability reportnya*.

Menurut teori legitimasi, perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan cenderung untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dengan lebih berkualitas (Alfaiz dan Aryati, 2019). Hal ini karena adanya tuntutan dari masyarakat agar perusahaan memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi tingkat transparansi informasi yang

diberikan, maka akan semakin meningkat pula legitimasi yang didapatkan perusahaan dari masyarakat. Selain itu perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pelanggan lebih tinggi juga cenderung untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dari pelanggan bahwa dalam pengolahan produk yang dipasarkan, perusahaan telah melakukannya dengan bertanggung jawab. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) serta Rudyanto dan Siregar (2018) yang menunjukkan bahwa industri sensitif lingkungan dan industri dekat konsumen berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hamudiana & Achmad (2017) menolak hasil tersebut karena terbukti bahwa industri sensitif lingkungan dan industri dekat konsumen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfaiz dan Aryati (2019) menunjukkan bahwa industri berorientasi pada investor berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) dan Hamudiana dan Achmad (2017) yang menyatakan adanya pengaruh positif antara industri berorientasi pada investor terhadap pengungkapan *sustainability report*. Rudyanto dan Siregar (2018) juga melakukan penelitian terhadap tekanan *stakeholder* dan menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara industri berorientasi pada karyawan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alfaiz dan Aryati (2019), Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) serta

Hamudiana dan Achmad (2017) yang mana industri berorientasi pada karyawan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Paparan mengenai fenomena gap dan ditemukannya *research gap* dalam beberapa penelitian sebelumnya menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini mencoba memunculkan variabel moderating berupa proporsi komisaris independen yang diduga ikut menentukan pengaruh tekanan *stakeholder* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*. Komisaris independen merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap praktik pelaksanaan *good corporate governance*. Semakin tinggi proporsinya, maka penerapan terhadap prinsip-prinsip GCG pun juga semakin meningkat. Akibatnya, perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi cenderung memiliki pengelolaan yang lebih baik dan transparansi informasi yang lebih luas. Berdasarkan uraian telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan dan Tekanan Stakeholder Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik pengungkapan *sustainability report*. Pengungkapan *sustainability report* yang

tinggi menunjukkan bahwa perusahaan bertanggungjawab terhadap dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang timbul akibat aktivitas yang dilakukan perusahaan. Pengungkapan *sustainability report* perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Profitabilitas suatu perusahaan.
2. *Leverage* suatu perusahaan.
3. *Customer-Proximity Industry/CPI* (industri dekat pelanggan).
4. *Employee-Oriented Industry/EOI* (industri berorientasi karyawan).
5. *Environmentally Sensitive Industry/ESI* (industri sensitif lingkungan).
6. *Investor-Oriented Industry/IOI* (industri berorientasi pada investor).
7. Proporsi komisaris independen dalam perusahaan.
8. Komite audit dalam perusahaan.
9. *Governance Committee* dalam perusahaan.
10. Dewan direksi dalam perusahaan.
11. Ukuran dewan komisaris dalam perusahaan.
12. Ukuran suatu perusahaan.
13. Struktur kepemilikan suatu perusahaan.
14. Tipe industri suatu perusahaan.
15. Kinerja lingkungan suatu perusahaan.

1.3. Cakupan Masalah

Berdasarkan tema sentral yang diteliti, penulis memberikan batasan masalah pada variabel dan perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji pengaruh kinerja keuangan yang diproksikan dalam variabel profitabilitas dan *leverage* serta tekanan *stakeholder* yang diproksikan dalam variabel *Customer-Proximity Industry/CPI* (industri dekat pelanggan), *Employee-Oriented Industry/EOI* (industri berorientasi karyawan), *Environmentally Sensitive Industry/ESI* (industri sensitif lingkungan) dan *Investor-Oriented Industry/IOI* (industri berorientasi pada investor) terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* dengan proporsi komisaris independen sebagai variabel moderating. Perusahaan yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan *Sustainability Report* secara terpisah dari *Annual Report* tahun 2016-2018.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *Customer-Proximity Industry* (CPI) berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?

4. Apakah *Employee-Oriented Industry* (EOI) berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
5. Apakah *Environmentally Sensitive Industry* (ESI) berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
6. Apakah *Investor-Oriented Industry* (IOI) berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
7. Apakah proporsi komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *Customer-Proximity Industry* (CPI) terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
8. Apakah proporsi komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *Employee-Oriented Industry* (EOI) terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
9. Apakah proporsi komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *Environmentally Sensitive Industry* (ESI) terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
10. Apakah proporsi komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *Investor-Oriented Industry* (IOI) terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *Customer-Proximity Industry* (CPI) terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *Employee-Oriented Industry* (EOI) terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
5. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *Environmentally Sensitive Industry* (ESI) terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
6. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *Investor-Oriented Industry* (IOI) terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
7. Untuk memperoleh bukti empiris peran proporsi komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *Customer-Proximity Industry* (CPI) terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

8. Untuk memperoleh bukti empiris peran proporsi komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *Employee-Oriented Industry* (EOI) terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
9. Untuk memperoleh bukti empiris peran proporsi komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *Environmentally Sensitive Industry* (ESI) terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
10. Untuk memperoleh bukti empiris peran proporsi komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *Investor-Oriented Industry* (IOI) terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memverifikasi teori di bidang akuntansi yang berkaitan dengan pengaruh kinerja keuangan dan tekanan *stakeholder* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* dengan proporsi komisaris independen sebagai variabel moderating seperti teori legitimasi, teori *stakeholder*, dan teori keagenan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Perusahaan

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajer perusahaan dalam menetapkan strategi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai dampak atas aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam bentuk pengungkapan *Sustainability Report* yang berkualitas.

2. Investor

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perusahaan dalam melakukan tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan dalam bentuk praktik pengungkapan *sustainability report* sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat.

3. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menetapkan peraturan dan standar untuk pelaporan keberlanjutan sehingga perkembangan *sustainability report* serta minat perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam melakukan tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan akan semakin meningkat.

4. Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak positif dan negatif aktivitas bisnis suatu perusahaan sehingga dapat menjadi kontrol bagi perusahaan maupun masyarakat itu sendiri.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas topik mengenai *sustainability report* dan telah menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan *sustainability report*. Hasil yang didapatkan beragam dimana terdapat penelitian yang menunjukkan ada pengaruh positif antara tekanan *stakeholder* terhadap pengungkapan *sustainability report*, ada pula yang menunjukkan hasil yang negatif, dan sebagian yang lain menunjukkan tidak ada pengaruh di antara keduanya.

Penelitian ini tidak hanya melihat apakah sebuah perusahaan menerbitkan *sustainability report* atau tidak, melainkan mengukurnya berdasarkan tingkat pengungkapan yang dilakukan. Penelitian yang merupakan gabungan dari penelitian-penelitian sebelumnya ini juga memberikan pembaharuan yaitu dengan menggunakan proporsi komisaris independen sebagai variabel moderating untuk menguji pengaruh tekanan *stakeholder* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report* dimana hal ini belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Kajian Teori Utama

2.1.1. Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder* menurut Ghazali dan Chariri (2007:409) merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Berdasarkan teori ini, semua informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan berhak diketahui oleh para *stakeholder*. Informasi tersebut dapat berupa informasi yang sifatnya wajib (*mandatory*) maupun informasi yang bersifat sukarela (*voluntary*).

Istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* (SRI) yang kemudian dikembangkan oleh Freeman di tahun 1984 dalam studinya yang berjudul *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Freeman mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok ataupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi. Rokhlinasari (2015) menyatakan ada dua jenis *stakeholder* yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer merupakan seseorang atau kelompok yang tanpa dukungan dan keberadaannya perusahaan tidak dapat bertahan untuk

going concern seperti *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok. Sedangkan *stakeholder* sekunder merupakan pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan namun mereka tidak berkaitan secara langsung dengan transaksi serta kebijakan perusahaan seperti lembaga pemerintah yang tidak memiliki wewenang langsung dalam pengambilan keputusan. Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan bahwa perusahaan harus menjaga hubungannya dengan *stakeholder* serta memenuhi kebutuhan dan keinginan *stakeholder* tersebut terutama *stakeholder* yang memiliki *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan perusahaan dalam aktivitas operasionalnya seperti tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain. Hal ini dikarenakan keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh para *stakeholder*. Semakin banyak dan kuat posisi *stakeholder*, maka akan semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mengadaptasi diri terhadap keinginan para *stakeholdernya* (Nurrahman dan Sudarno, 2013).

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan memenuhi dan mengelola harapan dari para pemangku kepentingan, di antaranya investor dan karyawan. Pada dasarnya dukungan *stakeholder* tersebut sangat dibutuhkan perusahaan agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun dukungan tersebut tidak datang dengan sendirinya sehingga perusahaan harus melakukan suatu cara untuk menarik dukungan tersebut. Meningkatkan transparansi informasi terkait aktivitas perusahaan merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencari dukungan dari *stakeholder*. Sebagai pemilik modal, investor membutuhkan informasi tersebut

sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Sedangkan bagi karyawan, informasi dibutuhkan untuk melihat bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki.

2.1.2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan teori yang menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan akan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada di dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat (Rokhlinasari, 2015). Menurut teori ini, perusahaan akan secara sukarela mengungkapkan informasi atas aktivitas yang dilakukan jika hal tersebut diharapkan oleh masyarakat. Deegan (2002) menyatakan bahwa teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi sehingga menuntut perusahaan untuk senantiasa responsif terhadap lingkungan sekitarnya.

Teori legitimasi menjelaskan apabila dalam menjalankan operasinya perusahaan tidak melakukan pelanggaran norma dan nilai sosial, maka keberadaannya akan mendapat dukungan dari masyarakat. Adhipradana dan Daljono (2014) menyatakan bahwa perusahaan akan dapat beroperasi dengan izin masyarakat. Namun izin tersebut hanya bersifat sementara sehingga perusahaan dituntut untuk memenuhi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan beroperasi dalam norma dan batas yang ada agar dapat terus menjalankan usahanya (*going concern*). Apabila perusahaan melakukan pelanggaran terhadap kontrak sosialnya dengan masyarakat maka masa depan perusahaan dapat terancam.

Nilai-nilai yang dianut perusahaan dan masyarakat tidak selalu sama. Lindblom (1994) menyatakan bahwa ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai

tersebut, maka legitimasi perusahaan akan berada dalam posisi terancam. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai "*legitimacy gap*" dimana dapat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya (Khafid dan Mulyaningsih, 2015). Guthrie dan Parker (1989) dalam Rokhlinasari (2015) menjelaskan apabila perusahaan merasa legitimasinya dipertanyakan maka strategi yang dapat dilakukan yaitu:

1. Mendidik dan menginformasikan kepada *stakeholder* mengenai perubahan yang terjadi dalam perusahaan.
2. Mengubah pandangan *stakeholder* tanpa mengganti perilaku perusahaan.
3. Mengalihkan perhatian *stakeholder* pada isu lain yang berkaitan dan menarik untuk memanipulasi persepsi *stakeholder*.
4. Mengganti dan mempengaruhi harapan pihak eksternal terhadap kinerja perusahaan.

Persepsi dan pengakuan publik merupakan dorongan utama bagi perusahaan untuk mengungkapkan suatu informasi atau tidak (Rokhlinasari, 2015). Dalam teori legitimasi, perusahaan dengan perolehan laba yang tinggi cenderung meningkatkan transparansi informasinya kepada masyarakat. Selain karena ketersediaan dana, pengungkapan informasi juga dilakukan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa perusahaan telah melakukan aktivitasnya secara bertanggung jawab sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat. Selain itu, perusahaan yang aktivitas bisnisnya sensitif terhadap lingkungan serta perusahaan yang memproduksi barang yang dikonsumsi oleh konsumen akhir juga cenderung

meningkatkan pengungkapan informasi untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat serta menaikkan *brand image* perusahaan.

2.1.3. Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang menggambarkan hubungan keagenan antara pemilik modal (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Teori ini menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer, investor dan kreditur) akan berperilaku, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda yang dapat menyebabkan terjadinya konflik (Husnan, 2001 dalam Sudarsi, 2008). Konflik tersebut dapat muncul ketika *principal* sebagai pihak penyedia dana menginginkan manajer bekerja secara maksimal dengan tujuan untuk memakmurkan pemegang saham namun manajer sebagai pihak pengelola lebih mengutamakan kepentingan dan kemakmuran individu.

Sudarsi (2008) menjelaskan beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya konflik antara lain: *excessive perquisite*, asimetri informasi, orientasi jangka pendek (manajer lebih menyukai melakukan investasi yang memberikan tingkat pengembalian jangka pendek karena manajer dibatasi oleh masa jabatan), pengambilalihan sumber daya manusia, *risk aversion*, serta *overretention* (manajer lebih menyukai mempertahankan sumber daya yang memiliki kemampuan meningkatkan likuiditas daripada meningkatkan dividen). Berbagai konflik tersebut memaksa *principal* mengeluarkan biaya agensi untuk melakukan pengawasan guna meyakinkan bahwa manajer bekerja dengan baik dan tidak bersikap *opportunistic*.

Menurut Hastuti (2016) biaya agensi tersebut dapat diminimalkan dengan beberapa cara antara lain:

1. Meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer-eksekutif sehingga kepemilikan dan kepentingan manajemen dan pemegang saham dapat sejajar (Jensen dan Meckling, 1976).
2. Meningkatkan *dividend payout ratio* sehingga tidak banyak tersedia *free cash flow*.
3. Meningkatkan pendanaan dengan hutang sehingga tidak tersedia aliran kas bebas berlebih yang dapat mengakibatkan pemborosan oleh manajemen.
4. Adanya kepemilikan oleh investor institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi serta institusi lain yang akan mendorong pengawasan secara lebih optimal atas kinerja manajemen (Bathala *et al.*, 1994).

Dalam teori keagenan, adanya pemisahan antara kepemilikan (*principal*) dan pengelolaan (manajer) menyebabkan manajer cenderung bertindak tidak sesuai keinginan pemilik demi meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya yang ditanggung oleh pihak lain (*principal*). Konsep ini dikenal sebagai *the separation of the decision making and risk bearing functions of the firm* atau pemisahan fungsi antara pengambil keputusan dengan penanggung risiko (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Sudarsi, 2008). Manajer berperan sebagai pengambil keputusan sedangkan pemilik modal berperan sebagai penanggung risiko. Akibatnya, jika muncul biaya keagenan, maka pemilik modal yang akan menanggung biaya tersebut.

Biaya keagenan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk memastikan bahwa manajer tidak bersikap *opportunistic* serta merugikan para pemegang saham. Trinanda *et al.* (2018) menyatakan bahwa perusahaan dengan struktur utang (*leverage*) yang tinggi cenderung memiliki biaya keagenan yang tinggi sehingga mereka akan mengungkapkan tidak sedikit informasi. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemilik modal, tambahan informasi ini juga dibutuhkan untuk membuang keraguan pemegang obligasi atas dipenuhinya hak-hak mereka sebagai pemberi pinjaman.

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1. Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*

1. Definisi dan Konsep *Sustainability Report*

Konsep pembangunan berkelanjutan bukan merupakan pemikiran baru karena konsep ini telah menjadi perhatian para ahli sejak lama. Pada Sidang Umum PBB tahun 2015 di New York, 193 negara telah menyepakati Deklarasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam SDGs tersebut ditetapkan 17 tujuan global dengan 169 target yang meliputi tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam hal ini sektor bisnis merupakan pemangku kepentingan utama karena erat kaitannya dengan proses pembangunan. Oleh karena itu nilai-nilai dan tata kelola yang diterapkan dalam sebuah perusahaan harus berhubungan dengan ekonomi global yang berkelanjutan.

Definisi pembangunan berkelanjutan menurut PBB adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perusahaan sebagai organisasi di dalam sektor bisnis memiliki peran penting dalam membangun masa depan berkelanjutan dengan menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Untuk mencapai *sustainable development* tersebut diperlukan sebuah kerangka global dengan bahasa yang konsisten serta dapat diukur dengan tujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai pelaporan berkelanjutan (Iriyanto dan Nugroho, 2014). *Global Reporting Initiative* (GRI) menjelaskan bahwa pelaporan berkelanjutan merupakan pengungkapan tentang dampak paling signifikan dari sebuah organisasi serta langkah pengelolaannya. Laporan berkelanjutan memuat informasi kinerja keuangan dan non keuangan (sosial dan lingkungan) yang mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan secara menyeluruh sehingga memungkinkan perusahaan untuk tumbuh secara berkesinambungan (Alfaiz dan Aryati, 2019).

Sustainability report merupakan praktik dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada seluruh *stakeholder* mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Alfaiz dan Aryati, 2019). Adanya *sustainability report* akan mendorong perusahaan untuk lebih transparan mengenai risiko dan peluang yang mereka hadapi. Peningkatan transparansi tersebut akan mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik serta dapat membangun kepercayaan para *stakeholder*. *Global Reporting Initiative* (GRI) menjelaskan bahwa

sustainability report merupakan *platform* utama untuk mengkomunikasikan kinerja serta dampak berkelanjutan, baik itu positif maupun negatif.

Saat ini, pengungkapan *sustainability report* menempati posisi yang sama pentingnya dengan pengungkapan informasi seperti yang diungkapkan dalam laporan keuangan. *Sustainability report* mencakup informasi keuangan dan non keuangan yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi kepada para pemangku kepentingan tetapi juga untuk meningkatkan prospek serta memungkinkan perusahaan untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Oleh karena itu adanya pelaporan berkelanjutan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Berikut merupakan manfaat *sustainability report* yang dijelaskan oleh *Global Reporting Initiative (GRI)*:

Manfaat *sustainability report* bagi pihak internal perusahaan:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai peluang dan risiko.
2. Menekankan hubungan kinerja keuangan dan non keuangan.
3. Mempengaruhi strategi dan kebijakan manajemen jangka panjang serta rencana bisnis.
4. Memperlancar proses, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.
5. Sebagai *benchmarking* (tolok ukur) dan penilaian kinerja keberlanjutan sehubungan dengan hukum, norma, kode, standar kinerja dan inisiatif sukarela.
6. Menghindari keterlibatan dalam kegagalan lingkungan, sosial dan tata kelola yang dipublikasikan.
7. Membandingkan kinerja secara internal dan antara organisasi dengan sektor.

Manfaat *sustainability report* bagi pihak eksternal perusahaan:

1. Mengurangi atau membalikkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola.
2. Meningkatkan reputasi dan loyalitas.
3. Memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan eksternal mengenai nilai sebenarnya dari sebuah organisasi serta aset berwujud dan tidak berwujud.
4. Menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekspektasi tentang pembangunan berkelanjutan.

Sustainability report merupakan salah satu bentuk strategi perusahaan untuk berkomunikasi kepada publik serta membangun kepercayaan publik. Melalui *sustainability report* perusahaan menyampaikan bahwa selain kepada *shareholder*, kreditor dan *supplier*, mereka juga peduli terhadap karyawan, masyarakat serta lingkungan sekitar.

Saat ini standar pengungkapan *sustainability report* yang banyak digunakan di seluruh negara yaitu standar dari *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI merupakan organisasi internasional independen yang memelopori adanya pelaporan berkelanjutan. Sejak pertama kali mengeluarkan standar di tahun 2000, GRI telah melakukan beberapa kali revisi. Standar yang berlaku pada saat ini adalah *GRI Standard* yang berisikan pedoman atas pengungkapan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dimana termasuk praktik ketenagakerjaan dan keamanan berkerja, HAM, masyarakat, serta tanggung jawab atas produk.

Untuk mencapai transparansi pelaporan, terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam melakukan pengungkapan *sustainability report*. Prinsip-prinsip tersebut telah diatur dalam GRI dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan dan prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan. Prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan menjelaskan proses yang harus diterapkan untuk mengidentifikasi konten laporan yang harus dibahas dengan mempertimbangkan aktivitas, dampak serta harapan substantif dari para *stakeholdernya*. Sedangkan prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan menjelaskan arahan berupa pilihan-pilihan untuk memastikan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan, termasuk penyajian yang tepat. Adanya informasi yang berkualitas akan memungkinkan para *stakeholder* dapat mengambil tindakan yang tepat serta membuat asesmen kinerja yang masuk akal.

a. Prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan

1) Pelibatan Pemangku Kepentingan

Isi laporan keberlanjutan yang ideal harus menggambarkan keterlibatan pemangku kepentingan dan menjelaskan bagaimana organisasi tersebut menanggapi harapan dan kepentingan mereka. Hal ini karena ekspektasi dan kepentingan *stakeholder* merupakan rujukan utama bagi sebuah perusahaan dalam menentukan keputusan penyusunan laporan. Pemangku kepentingan dapat termasuk orang-orang yang berinvestasi dalam perusahaan maupun mereka yang memiliki hubungan lain dengan perusahaan.

2) Konteks Keberlanjutan

Laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Pelaporan keberlanjutan adalah tentang bagaimana sebuah organisasi mampu berkontribusi atau bertujuan berkontribusi di masa mendatang terhadap perbaikan dan kemerosotan ekonomi, kondisi sosial dan lingkungan, perkembangan dan tren di tingkat lokal, regional maupun global. Oleh karena itu, laporan keberlanjutan tidak hanya mencakup tren pada level individu tetapi juga tentang strategi, risiko dan peluang organisasi jangka panjang.

3) Materialitas

Materialitas merupakan ambang batas di mana topik menjadi cukup penting sehingga harus dilaporkan. Oleh karena itu pelaporan keberlanjutan harus menyampaikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan organisasi yang signifikan atau secara substantif akan mempengaruhi penilaian dan keputusan para pemangku kepentingan.

4) Kelengkapan

Laporan harus mencakup dan memprioritaskan informasi yang relevan berdasarkan asas materialitas serta mampu mencerminkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi pada periode pelaporan.

b. Prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan

1) Keseimbangan

Laporan harus mencerminkan aspek-aspek positif maupun negatif dari kinerja organisasi sehingga memungkinkan dilakukan asesmen atas kinerja organisasi secara keseluruhan.

2) Komparabilitas

Organisasi harus memilih, mengumpulkan dan melaporkan informasi secara konsisten sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu dan mendukung analisis relatif terhadap organisasi lain.

3) Akurasi

Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan sehingga dapat menilai kinerja organisasi.

4) Ketepatan Waktu

Organisasi harus membuat laporan dengan jadwal yang teratur sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat.

5) Kejelasan

Organisasi harus membuat informasi tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan.

6) Keandalan

Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis dan mengungkapkan informasi serta proses yang digunakan dalam menyiapkan laporan agar dapat diuji yang akan menentukan kualitas serta materialitas informasi.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*

Pada dasarnya pengungkapan *sustainability report* sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Rokhimah (2018) membagi faktor-faktor tersebut ke dalam dua jenis yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dapat berupa regulasi pemerintah, kondisi perekonomian nasional, permasalahan lingkungan dan kondisi infrastruktur. Sedangkan faktor internal meliputi ukuran perusahaan, tipe industri, struktur kepemilikan, *corporate governance*, kinerja keuangan, rasio aktivitas dan pertumbuhan perusahaan.

Aniktia dan Khafid (2015) meneliti pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, *governance committee*, profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 246 perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada tahun 2013. Hasil menunjukkan bahwa dari enam variabel independen yang diteliti terdapat tiga variabel yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* yaitu komite audit, *governance committee*, dan *leverage*. Sedangkan variabel dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Variabel komite audit dan *governance committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* menunjukkan bahwa keberadaan dua komite ini akan mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara lebih luas. Meskipun tugas dan fungsinya berbeda namun keduanya akan membantu pelaksanaan praktik *good corporate governance* (GCG) berjalan lebih efektif. *Sustainability report* merupakan salah satu bentuk transparansi perusahaan atas dampak dari aktivitas bisnis yang dilakukan sebagai wujud penerapan prinsip GCG. Adanya komite audit dan *governance committee* akan mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab serta memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder*.

Selanjutnya, variabel *leverage* memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang suatu perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan berupaya untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholder* melalui *sustainability report*, baik kreditor maupun investor. Yi dan Yu (2010) dalam Aniktia dan Khafid (2015) menyatakan bahwa saat ini semakin banyak investor yang menggunakan *sustainability report* sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Maka ketika rasio utang suatu perusahaan tinggi, pengungkapan *sustainability report* dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengalihkan perhatian para *stakeholder*. Dalam kaitannya dengan kreditor, adanya *sustainability report* akan membantu para pemberi pinjaman untuk menilai faktor risiko terkait dengan bisnis yang dijalankan perusahaan.

Suryono dan Prastiwi (2011) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*. Karakteristik perusahaan diproksikan ke dalam lima variabel independen yaitu profitabilitas, likuiditas, *leverage*, aktivitas dan ukuran perusahaan. Sedangkan *corporate governance* diproksikan ke dalam tiga variabel independen yang meliputi komite audit, dewan direksi dan *governance committee*. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Profitabilitas dapat menunjukkan kesehatan ekonomi sebuah perusahaan sehingga perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan menunjukkan kinerja sosial yang lebih baik (Diono dan Prabowo, 2017). Adanya pengungkapan *sustainability report* akan menambah biaya yang dikeluarkan perusahaan sehingga perusahaan dengan profit yang rendah akan cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan yang sifatnya masih *voluntary* seperti *sustainability report*. Sedangkan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan lebih bebas dan fleksibel dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Jati, 2009).

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Perusahaan besar cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini karena semakin besar perusahaan maka akan semakin besar pula kemungkinan untuk mendapatkan tekanan-tekanan politis untuk melakukan pertanggungjawaban aktivitas sosial. Selain itu komite audit dan

dewan direksi juga berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* karena keberadaannya akan membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian agar berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip GCG.

Novitaningrum dan Amboningtyas (2017) meneliti pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report* dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. Penelitian yang dilakukan terhadap 15 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2016 ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Kepemilikan institusional merupakan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak eksternal seperti lembaga, perusahaan, asuransi, bank atau institusi lain (Bukhori, 2012 dalam Novitaningrum dan Amboningtyas, 2017). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan cenderung untuk melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan. Adanya saham yang dimiliki oleh institusi akan meningkatkan pengawasan yang lebih intensif terhadap manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi insentif manajer dalam mementingkan diri sendiri. Variabel komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* menunjukkan bahwa semakin dominan jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka *power* yang diberikan kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen dalam meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan juga semakin kuat.

Selanjutnya, profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA berpengaruh positif dalam memperkuat pengaruh kepemilikan institusional

terhadap *sustainability report*. Adanya pengawasan yang lebih besar dari pihak investor institusional akan menghalangi perilaku *opportunistic* manajer sehingga akan menuntut perusahaan untuk lebih transparan. Dengan profitabilitas yang tinggi, investor institusional dapat mendesak manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara lebih luas melalui pengungkapan *sustainability report* guna menjelaskan kepada para *stakeholder* bahwa *profit* yang didapatkan berasal dari kegiatan bisnis yang bertanggung jawab.

Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) meneliti pengaruh tekanan *stakeholder* terhadap transparansi *sustainability report*. Tekanan *stakeholder* diproksikan ke dalam empat indikator berdasarkan *primary stakeholder* yang terdiri dari *Customer-Proximity Industry/CPI* (industri dekat pelanggan), *Employee-Oriented Industry/EOI* (industri berorientasi karyawan), *Environmentally Sensitive Industry/ESI* (industri sensitif lingkungan) dan *Investor-Oriented Industry/IOI* (industri berorientasi pada investor). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan dari berbagai negara dengan saham yang diperdagangkan serta menerbitkan *sustainability report* pada tahun 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap transparansi pengungkapan *sustainability report*. Industri yang berorientasi pada investor dan karyawan memiliki pengaruh paling tinggi terhadap transparansi dan pengungkapan *sustainability report*, sedangkan industri sensitif lingkungan memiliki pengaruh yang paling rendah. Perusahaan dengan tingkat tekanan investor yang tinggi akan semakin meningkatkan transparansi laporan keberlanjutannya karena mengindikasikan adanya tekanan dari pasar modal untuk

menaikkan tingkat kepercayaan para investor. Selain itu, perusahaan dengan tekanan dari karyawan yang tinggi juga akan meningkatkan pengungkapan laporan berkelanjutan karena semakin banyak jumlah pekerja, maka akan semakin tinggi pula tingkat transparansi yang mereka minta.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fernandez-Feijoo *et al.* (2014), Rudyanto dan Siregar (2018) juga meneliti pengaruh tekanan *stakeholder* dan mekanisme *corporate governance* terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report* dimana tekanan *stakeholder* juga diprosikan ke dalam empat variabel independen. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2010 hingga 2014 terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan *stakeholder* yang diprosikan dalam variabel industri dekat konsumen dan industri sensitif lingkungan berpengaruh positif terhadap kualitas *sustainability report*. Sedangkan variabel industri berorientasi pada karyawan memiliki pengaruh negatif dan industri berorientasi pada investor tidak berpengaruh terhadap kualitas *sustainability report* dimana hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fernandez-Feijoo *et al.* (2014). Karyawan di Indonesia cenderung melihat bahwa adanya pengungkapan tanggung jawab sosial dan laporan berkelanjutan akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan perusahaan sehingga akan mengurangi tingkat gaji yang diberikan. Selain itu, tidak adanya sosialisasi yang baik mengenai pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan juga menjadi faktor yang menyebabkan karyawan menganggap bahwa pengungkapan laporan berkelanjutan akan mengurangi nilai dan merugikan perusahaan.

Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian Rudyanto dan Siregar (2018) terdiri dari efektivitas dewan komisaris dan kepemilikan keluarga. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Nurkhin (2009) dalam Hasanah *et al.* (2015) menyatakan bahwa keberadaan dewan komisaris dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan dimana pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan termasuk di dalamnya. Dewan komisaris yang efektif akan mampu mengendalikan moral manajemen dan mengarahkan manajer untuk bertindak secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kuantitas maupun kualitas pengungkapan laporan berkelanjutan (Rudyanto dan Siregar, 2018).

3. Pengukuran Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*

Sustainability report dapat diukur menggunakan variabel *dummy* yaitu dengan memberikan nilai 1 pada perusahaan yang melakukan pengungkapan dan memberi nilai 0 terhadap perusahaan yang tidak mengungkapkan *sustainability report*. Beberapa penelitian yang menggunakan pengukuran ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aniktia dan Khafid (2015), Pratama dan Yulianto (2015) serta Suryono dan Prastiwi (2011).

Pengukuran *sustainability report* yang dilakukan oleh Damanik (2017) terbagi ke dalam dua jenis yaitu pengungkapan secara kualitas dan pengungkapan secara kuantitas. Pengukuran secara kuantitas menggunakan *range* nilai dari 1 sampai 7 sesuai dengan bagaimana informasi tersebut diungkapkan. Nilai 1 untuk

informasi moneter, nilai 2 untuk informasi non-moneter, nilai 3 untuk informasi kualitatif, nilai 4 untuk informasi moneter kualitatif, nilai 5 untuk informasi kualitatif dan non-moneter, nilai 6 untuk informasi moneter dan non-moneter dan nilai 7 untuk informasi informasi kualitatif, moneter dan non-moneter. Pengukuran secara kuantitas dilakukan dengan memberikan nilai sesuai dengan berapa banyak informasi yang telah diungkapkan. Nilai 1 untuk pengungkapan dalam satu atau dua kalimat, nilai 2 untuk pengungkapan dalam satu paragraf, nilai 3 untuk pengungkapan dalam setengah halaman A4, nilai 4 untuk pengungkapan dalam satu halaman A4 dan nilai 5 untuk pengungkapan yang lebih dari satu halaman A4. Nilai maksimum yang dapat diperoleh yaitu 1043 untuk total kualitas dan 745 untuk total kuantitas.

Selain menggunakan variabel *dummy*, *sustainability report* juga dapat diukur berdasarkan kualitas pengungkapannya dengan menggunakan *content analysis*. Pada pengukuran ini, *sustainability report* dinilai dengan melihat indikator-indikator pengungkapan sesuai pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI). Saat ini, panduan *sustainability report* yang berlaku dan banyak digunakan oleh perusahaan adalah GRI G4 dan *GRI Standards*. Selain GRI, terdapat beberapa lembaga lain yang menerbitkan pedoman untuk penyusunan laporan keberlanjutan seperti *International Integrated Reporting Committee* (IIRC) dan *Sustainability Accounting Standard Board* (SASB). Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan pedoman untuk penyusunan *sustainability report* yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang

Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Pengukuran *sustainability report* menggunakan *content analysis* yaitu dengan memberi nilai 1 untuk item yang diungkapkan dan nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan. Nilai dari setiap item akan dijumlahkan untuk memperoleh skor perusahaan yang kemudian akan dibagi dengan jumlah item yang diharapkan untuk diungkapkan. Pengukuran semacam ini lebih banyak digunakan oleh beberapa peneliti karena hasil yang didapat cenderung lebih akurat dan menunjukkan tingkat tanggung jawab perusahaan secara lebih spesifik. Penelitian yang menggunakan pengukuran ini antara lain Alfaiz dan Aryati (2019), Diono dan Prabowo (2017), Fernandez-Feijoo *et al.* (2014), Rudyanto dan Siregar (2018) serta Sinaga dan Fachrurrozie (2017). Rumus untuk pengukuran dengan pendekatan *content analysis* yaitu:

$$SRDI = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{\text{jumlah item yang diharapkan diungkapkan}}$$

Selain menggunakan *content analysis*, Rudyanto dan Siregar (2018) juga menambahkan indikator pengukuran kualitas dengan menghitung jumlah halaman serta opini atas laporan pertanggung jawaban. Jumlah halaman dihitung dengan logaritma natura dari jumlah halaman *sustainability report* sedangkan opini atas laporan pertanggung jawaban dinilai dari ada tidaknya *GRI application check* dari pihak independen..

2.2.2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya (Farida *et al.*, 2010). Informasi dalam kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang tersedia (Barlian, 2003 dalam Orniati, 2009). Evaluasi atas kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio-rasio tertentu sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kondisi kesehatan keuangan perusahaan.

Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik biasanya akan lebih dikenal oleh masyarakat karena kinerja keuangan merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Namun kinerja keuangan yang tinggi tidak dapat dijadikan sebagai acuan bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab atas aktivitas bisnis yang dilakukan. Oleh karena itu pihak manajemen harus mampu menjelaskan kepada para *stakeholdernya* bagaimana keuntungan tersebut diperoleh. Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Aniktia dan Khafid (2015) menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan pengungkapan informasi sosial akan diikuti oleh pengeluaran yang dapat mengurangi pendapatan. Dengan adanya kinerja keuangan yang kuat, perusahaan akan mampu memenuhi keinginan *stakeholder* untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas melalui *sustainability report*.

Kinerja keuangan akan menunjukkan baik dan buruknya kondisi serta prestasi keuangan sebuah perusahaan dalam waktu tertentu. Selain untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, kinerja keuangan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek, membayar bunga pokok pinjaman serta kemampuan dalam meningkatkan besarnya modal sendiri (Orniati, 2009). Menurut J. Fred Weston dalam Kasmir (2015:106) terdapat enam jenis rasio kinerja keuangan yaitu likuiditas, solvabilitas atau *leverage*, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan dan penilaian (Erica, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Branco *et al.* (2014), Karlina *et al.* (2019), Ortas & Gallego-alvarez (2014), Trinanda *et al.* (2018), serta Utami (2015) menggunakan rasio kinerja keuangan berupa profitabilitas dan *leverage* sedangkan penelitian Adhipradana dan Daljono (2014) menggunakan profitabilitas dan likuiditas. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Idah (2013) menggunakan rasio kinerja keuangan berupa profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan aktivitas perusahaan. Penelitian ini menggunakan dua rasio kinerja keuangan sebagai variabel independen yaitu profitabilitas dan *leverage*.

1. Profitabilitas

a. Definisi dan Konsep Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal dan penjualan (Damanik, 2017). Semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh menandakan perusahaan tersebut memiliki daya saing yang tinggi dan terus bertumbuh. Selain itu, profitabilitas juga mencerminkan efektivitas dan

efisiensi yang dilakukan manajemen perusahaan. Jika seorang manajer mampu mengelola perusahaan dengan baik maka biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan menjadi lebih kecil sehingga *profit* yang dihasilkan pun menjadi lebih besar (Herawati, 2013).

Pada hakikatnya tujuan ekonomi dari sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Herawati (2013) menyatakan bahwa tingginya laba yang dihasilkan sebuah perusahaan mencerminkan perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik kedepan sehingga akan lebih menarik perhatian investor. Para investor menganggap bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka akan semakin besar kemampuan perusahaan dalam memberikan *return* kepada para pemegang sahamnya.

Kasmir (2008:197) dalam Rambe (2013) menyatakan bahwa tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan yaitu:

- 1) Untuk menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman.

b. Pengukuran Profitabilitas

Menurut Agus Sartono (2010:113), indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu:

- a. *Gross Profit Margin* (GPM) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba kotor dari setiap penjualan perusahaan.

$$GPM = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

- b. *Net Profit Margin* (NPM) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari setiap penjualan setelah dikurangi pajak.

$$NPM = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

- c. *Return on Investmen* (ROI) digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu memberikan pengembalian keuntungan atas investasi yang telah ditanamkan.

$$ROI = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Investasi}}$$

- d. *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang digunakan.

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

- e. *Return on Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi para *shareholder* (pemegang saham).

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2. *Leverage*

a. Definisi dan Konsep *Leverage*

Menurut Van Home (1997) dalam Utama dan Lisa (2018) *Financial Leverage* merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetap sehingga akan menambah keuntungan para pemegang saham. *Leverage* disebut juga sebagai rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Aniktia dan Khafid (2015) menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi sangat bergantung pada kepercayaan dan dukungan dari para kreditor karena rasio ini menggambarkan bagaimana kemampuan perusahaan membayar semua kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, kreditor juga akan memberikan tekanan yang semakin tinggi untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mengembalikan dan membayar pokok pinjaman beserta bunganya.

Leverage atau yang disebut juga sebagai solvabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan melakukan pemenuhan sumber dana melalui utang (pinjaman). Riyanto (2008) dalam Wibowo dan Wartini (2012) menyatakan bahwa penggunaan utang yang terlalu besar dan melebihi aktiva akan berdampak pada kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Namun apabila utang tersebut dikelola dengan baik dan digunakan untuk proyek investasi yang produktif maka dapat memberikan pengaruh positif yang akan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki risiko keuangan yang tinggi pula. Kondisi ini dapat terjadi ketika manajemen memilih melakukan pinjaman berbunga tinggi sehingga beban bunga yang harus dibayarkan pun menjadi lebih besar. Peningkatan atas beban tersebut akan menyebabkan penurunan terhadap laba perusahaan. Selain itu ketika tingkat *leverage* tinggi maka kecenderungan perusahaan untuk melanggar perjanjian kredit pun juga meningkat. Namun di sisi lain, perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi juga berpeluang besar untuk menghasilkan laba yang tinggi. Kondisi ini dapat dicapai apabila perusahaan dapat memanfaatkan dana pinjaman secara efektif dan efisien seperti pembelian aset yang produktif.

b. Pengukuran *Leverage*

Agus Sartono (2012:121) membagi pengukuran *leverage* ke dalam beberapa jenis yaitu Debt Ratio, Debt to Equity Ratio, Time Interest Earned Ratio, Fixed Charge Coverage, dan Debt Service Coverage. Berikut merupakan penjelasan beserta rumusnya:

a. *Debt Ratio*

Debt Ratio merupakan seberapa besar total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar pula risiko yang dihadapi perusahaan karena jumlah modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva rendah. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai *debt ratio* maka semakin sedikit pula jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang.

$$Debt Ratio = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aktiva}$$

b. *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang membandingkan antara seluruh utang perusahaan baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek dengan ekuitas perusahaan. Semakin tinggi nilai DER maka akan semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan karena menunjukkan sebagian besar modal yang dimiliki berasal dari utang.

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. *Time Interest Earned Ratio*

Time Interest Earned Ratio merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban tetapnya berupa bunga. Semakin besar rasio *Time Interest Earned Ratio* maka semakin baik bagi perusahaan.

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba sebelum pajak dan bunga}}{\text{Beban bunga}}$$

d. *Fixed Charge Coverage*

Fixed Charge Coverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar semua biaya atau beban tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, pinjaman dan sewa. Semakin tinggi rasio *Fixed Charge Coverage* menunjukkan bisnis yang semakin sehat sehingga risiko yang dihadapi perusahaan semakin kecil.

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{EBIT + \text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}{\text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}$$

e. *Debt Service Coverage*

Debt Service Coverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dalam membayar beban tetapnya dengan memasukkan unsur pembayaran pokok atau angsuran pokok pinjaman. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan memiliki lebih banyak uang kas dan lebih mampu membayar kewajiban utang lancarnya secara tepat waktu.

$$\text{Debt Service Coverage} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Bunga} + \text{Sewa} + \frac{\text{Angsuran pokok pinjaman}}{(1 - \text{tarif pajak})}}$$

2.2.3. Tekanan *Stakeholder*

Freeman (1984) dalam Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) menilai bahwa terdapat hubungan antara perusahaan dengan kelompok-kelompok yang berbeda selain para pemegang saham. Kelompok ini hampir selalu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Oleh karena itu konsep pemangku kepentingan diperkenalkan untuk menjelaskan hubungan antara organisasi dengan kelompok yang berbeda tersebut yang antara lain adalah pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat, dan lingkungan.

Suharyani *et al.* (2019) menyatakan bahwa di dalam *stakeholder theory* perusahaan dituntut untuk tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan investor tetapi harus peduli terhadap karyawan, konsumen dan masyarakat karena perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar dari kepentingan manajemen serta pemilik modal. Dukungan dari para pemangku

kepentingan tersebut sangat dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan usahanya dimana pada setiap industri yang berbeda, *stakeholdernya* juga akan berbeda. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki tuntutan terhadap perusahaan yang mana tuntutan tersebut akan menjadi tekanan bagi perusahaan agar dalam menjalankan kegiatan bisnis memperhatikan setiap dampak yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masing-masing *stakeholder*.

Penelitian Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) menjelaskan hubungan antara *stakeholder* dan industri berdasarkan kemungkinan tekanan dari empat kelompok *stakeholder* yang terdiri dari pelanggan, karyawan, lingkungan dan investor. Dengan menggunakan perspektif kelembagaan dan teori-teori pemangku kepentingan, Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) membedakan industri ke dalam empat kategori yang terdiri *Customer-Proximity Industry/CPI* (industri dekat pelanggan), *Employee-Oriented Industry/EOI* (industri berorientasi karyawan), *Environmentally Sensitive Industry/ESI* (industri sensitif lingkungan) dan *Investor-Oriented Industry/IOI* (industri berorientasi pada investor). Beberapa penelitian terdahulu yang juga mengategorikan tekanan *stakeholder* ke dalam empat kelompok tersebut yaitu Alfaiz dan Aryati (2019), Hamudiana & Achmad (2017), Rudyanto dan Siregar (2018), serta Suharyani *et al.* (2019). Penelitian Nilawati *et al.* (2018) mengategorikan tekanan *stakeholder* ke dalam dua kelompok yaitu *Environmentally Sensitive Industry* dan *Investor-Oriented Industry*. Penelitian ini menggunakan variabel tekanan *stakeholder* berupa *Customer-Proximity Industry/CPI*, *Employee-Oriented Industry/EOI*, *Environmentally Sensitive Industry/ESI*, dan *Investor-Oriented Industry/IOI*.

1. *Customer-Proximity Industry (CPI)*

a. Definisi dan Konsep *Customer-Proximity Industry (CPI)*

Konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun orang lain dengan tujuan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dua jenis konsumen yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir (*end-user*) merupakan pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk sedangkan konsumen antara (*intermediate consumer*) merupakan konsumen yang menggunakan produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Dibanding dengan perusahaan yang memproduksi barang antara, perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh *end-user* cenderung lebih memiliki kedekatan dengan para konsumennya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) bahwa perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas (konsumen akhir) dapat dikategorikan ke dalam *customer proximity industries* (industri dengan kedekatan pelanggan).

Customer-Proximity Industry (CPI) merupakan sebuah konsep yang menunjukkan bagaimana jenis barang atau jasa yang diproduksi perusahaan dapat mempengaruhi kedekatannya dengan pelanggan. McWilliams dan Siegel (2001) dalam Rudyanto dan Siregar (2018) menyatakan bahwa perusahaan yang memproduksi barang yang dikonsumsi oleh konsumen akhir cenderung lebih diperhatikan daripada perusahaan yang memproduksi barang antara. Pada perusahaan jenis ini, citra dan *image* perusahaan merupakan suatu hal yang penting

dan dapat menentukan keberlangsungan usaha. Semakin dekat sebuah industri terhadap pelanggan, maka semakin besar pula tekanan yang akan didapat. Hal ini rasional mengingat saat ini telah banyak konsumen cerdas, sehingga dalam melakukan keputusan pembelian mereka tidak hanya melihat dari sisi kuantitas dan kualitas, namun juga mempertimbangkan *image* dari perusahaan yang memproduksi.

b. Pengukuran *Customer-Proximity Industry* (CPI)

Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “*Effect of Stakeholders’ Pressure on Transparency of Sustainability Reports within the GRI Framework*” mengategorikan tekanan *stakeholder* ke dalam empat kelompok yaitu konsumen, karyawan, lingkungan dan investor. Industri berorientasi konsumen diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Nilai 1 diberikan untuk perusahaan yang merupakan bagian dari industri terkenal karena produksi barang dan jasanya dikonsumsi oleh masyarakat umum. Yang termasuk dalam kategori ini adalah industri energi, jasa keuangan, produk makanan dan minuman, kesehatan, produk rumah tangga dan pribadi, pengecer, telekomunikasi, tekstil dan pakaian, limbah manajemen, air bersih, layanan komersial, media, tembakau, pariwisata, mainan dan universitas. Sedangkan untuk industri selain yang termasuk dalam kategori tersebut diberikan nilai 0.

Kemudian Rudyanto dan Siregar (2018) dalam penelitiannya juga menggunakan variabel *dummy* untuk mengukur *consumers as the stakeholder*. Namun karena objek dalam penelitiannya adalah perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia, maka pengukuran terhadap variabel CPI juga disesuaikan dengan kondisi perusahaan di Indonesia. Untuk perusahaan yang termasuk dalam industri barang-barang konsumsi, jasa keuangan, restoran, hotel dan tour, barang-barang ritel, percetakan, periklanan, media, perawatan kesehatan, tekstil dan garmen, sepatu, industri energi, perusahaan investasi dan telekomunikasi diberi nilai 1 sedangkan industri lainnya diberi nilai 0.

2. *Employee-Oriented Industry (EOI)*

a. Definisi dan Konsep *Employee-Oriented Industry (EOI)*

Employee-Oriented Industry (EOI) menunjukkan seberapa jauh sumber daya manusia (karyawan) yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi tekanan yang diterima perusahaan. Semakin baik hubungan perusahaan terhadap para karyawannya, maka semakin tinggi daya saing dan inovasi yang akan diciptakan. Adanya isu mengenai pembangunan berkelanjutan telah mendorong para karyawan untuk memperhatikan perusahaan tempatnya bekerja. Karyawan-karyawan yang berkualitas akan mengerti pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga akan menuntut manajemen untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaan.

Saat ini, aset yang paling berharga dalam sebuah perusahaan bukan berupa aset yang dapat diukur, melainkan aset yang tidak dapat diukur seperti *intellectual capital* dan sumber daya manusia (Rudyanto dan Siregar, 2018). Memiliki karyawan yang berkualitas merupakan salah satu bentuk keuntungan bagi perusahaan, karena kinerja karyawan akan menentukan kinerja perusahaan.

Kegiatan operasional perusahaan dapat tergoncang ketika sumber daya manusia yang dimiliki tidak berkualitas. Oleh karena itu untuk menghindari kehilangan karyawan yang berkualitas perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial karena tingkat transparansi perusahaan juga menjadi salah satu pertimbangan karyawan yang berkualitas dalam memilih tempat bekerja.

b. Pengukuran *Employee-Oriented Industry* (EOI)

Employee-Oriented Industry/EOI (industri berorientasi karyawan) dalam penelitian Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) diukur dengan menggunakan ukuran perusahaan karena semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin tinggi tekanan dari karyawannya. Jika termasuk dalam perusahaan besar atau multinasional maka akan diberikan nilai 1, sedangkan untuk perusahaan kecil dan menengah diberi nilai 0. Berbeda dengan Fernandez-Feijoo *et al.* (2014), penelitian yang dilakukan oleh Rudyanto dan Siregar (2018), Alfaiz dan Aryati (2019) serta Suharyani *et al.* (2019) mengukur *Employee-Oriented Industry* dengan menggunakan logaritma natural dari jumlah karyawan.

3. *Environmentally Sensitive Industry* (ESI)

a. Definisi dan Konsep *Environmentally Sensitive Industry* (ESI)

Lingkungan merupakan salah satu *primary stakeholder* bagi perusahaan yang aktivitas utamanya sensitif terhadap kelestarian lingkungan. Yang tergolong dalam industri sensitif lingkungan adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki tekanan tinggi dari berbagai kelompok masyarakat karena kegiatan bisnisnya berpotensi besar dalam menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini sejalan dengan

pernyataan Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) bahwa perusahaan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan serta menghasilkan polusi dalam jumlah yang tinggi dapat dikategorikan ke dalam *Environmentally Sensitive Industry*.

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan cenderung untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara lebih luas dibanding perusahaan yang tidak sensitif terhadap lingkungan. Hal ini karena adanya tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat yang dapat mengancam eksistensi perusahaan. Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam peraturan ini, perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berkembangnya isu mengenai *green bussines* dan *green accounting* telah mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak dari aktivitas bisnis yang dilakukan. *Environmentally Sensitive Industry* merupakan sebuah konsep mengenai hubungan antara industri terhadap lingkungan sekitarnya. Semakin besar keterkaitan antara industri terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekitar, maka semakin tinggi pula risiko kerusakan lingkungan yang dihadapi. Adanya potensi besar dalam menyebabkan kerusakan lingkungan membuat industri tersebut dikategorikan ke dalam *Environmentally Sensitive Industry* (industri sensitif lingkungan).

b. Pengukuran *Environmentally Sensitive Industry* (ESI)

Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) dalam penelitiannya mengukur *Environmentally Sensitive Industry/ESI* (industri sensitif lingkungan) dengan menggunakan variabel *dummy*. Nilai 1 diberikan untuk perusahaan yang termasuk dalam industri pertanian, otomotif, penerbangan, kimia, konstruksi, bahan konstruksi, energi, utilitas energi, hasil hutan dan kertas, logistik, produk logam, pertambangan, kereta api, pengelolaan limbah dan air. Untuk industri lainnya diberikan nilai 0. Pengukuran dengan variabel *dummy* tersebut juga dilakukan oleh Rudyanto dan Siregar (2018) namun sudah disesuaikan dengan kondisi perusahaan di Indonesia. Nilai 1 diberikan untuk perusahaan yang termasuk dalam industri agrikultur, pertambangan, industri kimia, mesin, otomotif dan komponennya, kabel properti, perumahan dan konstruksi, industri energi, jalan tol, lapangan terbang, pelabuhan, transportasi, konstruksi non bangunan dan elektronik. Sedangkan untuk industri lainnya diberi nilai 0. Peneliti lain yang juga menggunakan indikator tersebut dalam mengukur *Environmentally Sensitive Industry* yaitu Alfaiz dan Aryati (2019) serta Hamudiana dan Achmad (2017).

4. *Investor-Oriented Industry* (IOI)

a. Definisi dan Konsep *Investor-Oriented Industry* (IOI)

Investor merupakan pihak yang menginvestasikan dananya dalam perusahaan dengan tujuan untuk untuk mendapatkan imbal balik berupa keuntungan. Dalam perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, investor disebut sebagai pemegang saham (*shareholder*) karena bukti penyertaan modalnya berupa kepemilikan

saham. Semakin banyak jumlah saham yang dimiliki, maka semakin besar pula keuntungan yang akan didapat. Berkaitan dengan jumlah kepemilikan saham, terdapat dua kelompok *shareholder* di dalam perusahaan yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Seorang investor dapat dikatakan sebagai pemegang saham mayoritas apabila jumlah kepemilikan saham dalam perusahaan lebih dari 50% atau yang tertinggi dibanding pemegang saham lain sedangkan yang berada di bawahnya merupakan pemegang saham minoritas.

Sebagai pihak penyedia dana, investor merupakan pemangku kepentingan utama yang dukungannya sangat dibutuhkan perusahaan. Semakin kuat posisi seorang investor, maka semakin besar pula pengaruh yang dapat diberikan sehingga menuntut perusahaan untuk mengadaptasi diri terhadap keinginan mereka. Dalam konsep *Investor-Oriented Industry*, seorang pemegang saham dianggap sebagai pihak yang mampu memberikan tekanan pada perusahaan karena *power* yang dimiliki. Semakin luas penyebaran kepemilikan saham, maka semakin tinggi pula tekanan yang didapat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rudyanto dan Siregar (2018) bahwa perusahaan yang kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada beberapa pihak cenderung mendapatkan tekanan yang lebih kecil dibanding perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan saham yang tinggi. Informasi akan lebih mudah disampaikan ketika jumlah kepemilikan saham terkonsentrasi sehingga masalah keagenan yang mungkin muncul pun dapat diminimalisir. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat penyebaran kepemilikan saham dalam perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tekanan yang didapat.

b. Pengukuran *Investor-Oriented Industry* (IOI)

Investor-Oriented Industry/IOI (industri berorientasi pada investor) dalam penelitian Fernandez-Feijoo *et al.*, (2014) diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Jika lebih dari 50% saham perusahaan diperdagangkan di bursa atau termasuk dalam industri otomotif, penerbangan, bahan kimia, computer, konstruksi, bahan bangunan, barang-barang konsumen, energi, utilitas energi, jasa keuangan, produk kesehatan, produk rumah tangga dan pribadi, media, produk logam, *real estate*, pengecer, perangkat teknologi, telekomunikasi, tekstil dan pakaian serta mainan anak akan diberi nilai 1. Untuk industri lainnya akan diberi nilai 0.

Rudyanto dan Siregar (2018) menggunakan indikator yang berbeda dalam mengukur *Investor-Oriented Industry* (IOI). IOI diukur dengan menghitung tingkat konsentrasi kepemilikan saham dalam perusahaan. Semakin tinggi konsentrasi kepemilikannya, maka semakin rendah tekanan dari para pemegang sahamnya.

$$\text{Tekanan investor} = \frac{\text{Jumlah saham perusahaan induk}}{\text{Jumlah saham keseluruhan}}$$

2.2.4. Proporsi Komisaris Independen

1. Definisi Komisaris Independen

Wardhani (2007) dalam Dananjaya dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris adalah organ perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen serta berwenang untuk memberikan saran atau nasihat kepada direksi atas berbagai tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan. Jumlah

minimal dewan komisaris dalam sebuah perusahaan adalah satu orang sedangkan batas maksimalnya tidak ada. Namun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 Pasal 18 disebutkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak boleh melebihi jumlah anggota dewan direksi. Selain itu setiap perusahaan efek yang memiliki dewan komisaris lebih dari dua orang juga wajib memiliki komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh anggotanya. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas, anggota dewan direksi serta anggota dewan komisaris. Keberadaan komisaris independen dalam sebuah perusahaan akan sangat bermanfaat dalam meminimalisir terjadinya benturan kepentingan antara beberapa pihak seperti manajemen, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Sebagai bagian dari dewan komisaris, komisaris independen memiliki tanggung jawab yang sama dengan dewan komisaris, yaitu:

- a. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan Efek pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola.

- d. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya secara independen.
- e. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- f. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris.
- g. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Tugas dan tanggung jawab tersebut diatur pada bagian kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017. Selain itu, komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris juga berkewajiban melaksanakan fungsi audit dan penelaahan atas:

- a. Informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Efek kepada publik dan/atau pihak otoritas.
- b. Independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik.
- c. Rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik.
- d. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perusahaan Efek.

Keberadaan komisaris independen dalam sebuah perusahaan akan mendorong manajemen lebih transparan dalam melakukan pengungkapan informasi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kebijakan yang diberlakukan. Semakin tinggi proporsinya maka akan semakin kuat *power* yang dimiliki untuk menekan perilaku *opportunistic* manajer. Selain itu, keberadaan komisaris independen sebagai wakil dari pemegang saham minoritas serta investor juga dapat meningkatkan kualitas laporan perusahaan karena laporan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para *stakeholdernya*.

2. Pengukuran Komisaris Independen

Variabel proporsi komisaris independen dalam penelitian Amran *et al.* (2013), Ong dan Djajadikerta (2018), Aniktia dan Khafid (2015), Diono dan Prabowo (2017), Nabila dan Daljono (2013), Shamil *et al.* (2014), serta Sinaga dan Fachrurrozie (2017) diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris dalam perusahaan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam perusahaan, maka semakin baik pula penerapan prinsip *good corporate governancenya*.

$$\text{Proporsi komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$$

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dan tekanan *stakeholder* terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji *sustainability report* telah banyak dilakukan dan menjadi acuan dalam penelitian ini. Seperti penelitian Amran *et al.* (2013) yang berjudul *The Influence of Governance Structure and Strategic Corporate Social Responsibility Toward Sustainability Reporting Quality*. Penelitian yang dilakukan terhadap 113 perusahaan yang tersebar di 12 negara ini menunjukkan bahwa *Organization vision and mission*, *CSR committee* dan, *Collaborate with NGO* berpengaruh positif terhadap *Sustainability Reporting Quality*. Sedangkan *board size*, *board independence*, dan *board gender proportion* tidak berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting Quality*. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol *firm size*, *country domicile*, *industry*, dan *board structure*. Namun hasil menunjukkan bahwa keseluruhan variabel kontrol tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap *Sustainability Reporting Quality*.

Selanjutnya, Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) melakukan penelitian dengan judul *Effect of Stakeholders' Pressure on Transparency of Sustainability Reports within the GRI Framework* terhadap perusahaan-perusahaan di Amerika, Eropa dan Asia dari tahun 2008 hingga 2010. Hasil menunjukkan bahwa seluruh proksi *stakeholder pressure* yang meliputi *Customer proximity industries*, *Employee-oriented industries*, *Environmentally sensitive industries*, dan *Investor-oriented industries* berpengaruh positif terhadap transparansi *sustainability report*.

Shamil *et al.* (2014) melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Colombo Stock Exchange (CSE), Sri Lanka tahun 2012 untuk menguji pengaruh *board size*, *board independence*, *dual leadership*, *boards with female*, dan

ethnically diverse boards terhadap *sustainability reporting* dengan menggunakan variabel kontrol *firm size, firm growth, leverage, firm age, industry*. Hasil dalam penelitian ini yaitu *board size, dual leadership, firm size, firm growth* berpengaruh positif terhadap *sustainability reporting* sedangkan *boards with female, firm age* berpengaruh negatif terhadap *sustainability reporting*. Variabel *board independence, ethnically diverse boards, profitability, leverage, dan industry* tidak berpengaruh terhadap *sustainability reporting*.

Aniktia dan Khafid (2015) menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *sustainability report* dengan menggunakan metode analisis regresi logistik. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil menunjukkan bahwa komite audit, *governance committee*, dan *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* sedangkan dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Pratama dan Yulianto (2015) dengan judul Faktor Keuangan dan *Corporate Governance* sebagai Penentu Pengungkapan *Sustainability Report*. Penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan terdaftar di BEI tahun 2010-2013 ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* sedangkan kepemilikan institusional, dewan komisaris, *governance committee*, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Selanjutnya, Marwati dan Yulianti (2015) menguji dan menganalisis pengaruh ROA, likuiditas, ukuran perusahaan, *earning*

per share (EPS) terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sampel yang digunakan adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2013 dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa ROA, ukuran perusahaan dan *earning per share* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Khafid dan Mulyaningsih (2015) menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dewan direksi, komite audit, dan *governance committee* terhadap publikasi *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik dimana diperoleh hasil bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan *governance committee* berpengaruh positif terhadap publikasi *sustainability report* sedangkan *leverage*, dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh. Selanjutnya Sinaga dan Fachrurrozie (2017) juga melakukan penelitian terkait pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016 dengan judul *The Effect of Profitability, Activity Analysis, Industrial Type and Good Corporate Governance Mechanism on The Disclosure of Sustainability Report*. Hasil menunjukkan bahwa yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* adalah *industrial type* dan *board of directors* sedangkan yang berpengaruh negatif adalah *profitability*.

Diono dan Prabowo (2017) meneliti pengaruh ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan komisaris perempuan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report* terhadap

perusahaan terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel independen kecuali ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif. Kemudian Rudyanto dan Siregar (2018) melakukan penelitian berjudul *The effect of stakeholder pressure and corporate governance on the quality of sustainability report* terhadap perusahaan terdaftar di BEI. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2010-2014 ini mendapatkan hasil bahwa *consumers as the stakeholder*, *environment as the stakeholder*, *board of commissioner*, *profitability* dan *firm size* berpengaruh positif terhadap *sustainability report quality*, *employee as the stakeholder* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *sustainability report quality* dan *shareholders as the stakeholder* dan *family ownership* tidak berpengaruh terhadap *sustainability report quality*.

Penelitian tentang pengungkapan *sustainability report* juga dilakukan oleh Ong dan Djajadikerta (2018) dengan judul *Corporate governance and sustainability reporting in the Australian resources industry: an empirical analysis*. Penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Australian Securities Exchange (ASX) ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari *independent directors*, *multiple directorship*, dan *female directors* berpengaruh positif terhadap *total sustainability disclosures*. Selanjutnya, Nilawati *et al.* (2018) meneliti pengaruh *stakeholders pressure* dan *corporate financial performance* terhadap transparansi *sustainability report*. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan terdaftar di BEI tahun 2013-2017 menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa

environmental sensitive industry, investor-oriented industry, dan corporate financial performance berpengaruh terhadap transparansi dari *sustainability report*.

Lucia dan Panggabean (2018) melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia berjudul *The effect of firm's characteristic and corporate governance to sustainability report disclosure*. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013-2015 ini menunjukkan hasil bahwa *profitability* dan *company size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* sedangkan *audit committee* berpengaruh negative terhadap pengungkapan *sustainability report*. Selain itu, hasil juga menunjukkan bahwa *leverage, liquidity, dan board of director* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Alfaiz dan Aryati (2019) dengan judul Pengaruh Tekanan *Stakeholder* dan Kinerja Keuangan Terhadap Kualitas *Sustainability Report* dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Hasil menunjukkan bahwa tekanan karyawan dan tekanan konsumen berpengaruh positif terhadap kualitas *sustainability report* sedangkan tekanan pemegang saham berpengaruh negatif terhadap kualitas *sustainability report*. Selain itu penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa komite audit dapat memperkuat pengaruh tekanan pemegang saham terhadap kualitas *sustainability report* namun memperlemah pengaruh tekanan karyawan dan tekanan konsumen terhadap kualitas *sustainability report*. Variabel profitabilitas dan tekanan lingkungan tidak berpengaruh terhadap kualitas *sustainability report*.

Adapun rincian penelitian terdahulu terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil
1.	1. Azlan Amran 2. Shiau Ping Lee 3. Susela Selvaraj (2013)	<i>The Influence of Governance Structure and Strategic Corporate Social Responsibility Toward Sustainability Reporting Quality</i>	Variabel dependen: <i>Sustainability Reporting Quality</i> Variabel independen: <i>Board size, board independence, board gender proportion, organization vision and mission, CSR committee, dan Collaborate with NGO</i> Variabel kontrol: <i>firm size, country domicile, industry, board structure</i>	Analisis Regresi Berganda	– <i>Organization vision and mission, CSR committee dan, Collaborate with NGO</i> berpengaruh positif terhadap <i>Sustainability Reporting Quality</i> – <i>Board size, board independence, board gender proportion, firm size, country domicile, industry, dan board structure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Sustainability Reporting Quality</i>
2.	1. Belen Fernandez-Feijoo 2. Silvia Romero 3. Silvia Ruiz (2014)	<i>Effect of Stakeholders' Pressure on Transparency of Sustainability Reports within the GRI Framework</i>	Variabel dependen: <i>Transparency of Sustainability Reports</i> Variabel independen: <i>Customer proximity industries, Employee-oriented</i>	Analisis Regresi Linear	– <i>Customer proximity industries, Employee-oriented industries, Environmentally sensitive industries, Investor-oriented industries</i> berpengaruh positif terhadap <i>Transparency of Sustainability Reports</i>

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil
			<i>industries, Environmentally sensitive industries, Investor-oriented industries</i>		
3.	1. Mohamed M. Shamil 2. Junaid M. Shaikh 3. Poh-Ling Ho 4. Anbalagan Krishnan (2014)	<i>The influence of board characteristics on sustainability reporting</i>	Variabel dependen: <i>Sustainability reporting</i> Variabel independen: <i>Board size, board independence, dual leadership, boards with female, dan ethnically diverse boards</i> Variabel kontrol: <i>firm size, firm growth, leverage, firm age, industry</i>	Analisis Regresi Logistik	– <i>Board size, dual leadership, firm size, firm growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>sustainability reporting</i> <i>Boards with female, firm age</i> berpengaruh negatif terhadap <i>sustainability reporting</i> – <i>Board independence, ethnically diverse boards, profitability, leverage, dan industry</i> tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability reporting</i>
4.	1. Ria Aniktia 2. Muhammad Khafid (2015)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan	Variabel dependen: Pengungkapan <i>sustainability report</i> Variabel independen: dewan komisaris	Analisis regresi logistik	–Komite audit, <i>governance committee</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil
		<i>Sustainability Report</i>	independen, komite audit, kepemilikan manajerial, <i>governance committee</i> , profitabilitas, dan <i>leverage</i>		- Dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>
5.	1. Andri Pratama 2. Agung Yulianto (2015)	Faktor Keuangan dan <i>Corporate Governance</i> sebagai Penentu Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Variabel dependen: Pengungkapan <i>sustainability report</i> Variabel independen: Profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dewan komisaris, <i>governance committee</i> , dan komite audit	Analisis Regresi Logistik	- Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> - Kepemilikan institusional, dewan komisaris, <i>governance committee</i> , dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>
6.	1. Candri Puspita Marwati 2. Yulianti 3. (2015)	Analisis Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan Non-keuangan Tahun 2009-2013	Variabel dependen: Pengungkapan <i>sustainability report</i> Variabel independen: ROA, likuiditas, ukuran perusahaan, dan <i>earning per share</i>	Analisis Regresi Berganda	- ROA, ukuran perusahaan, dan <i>earning per share</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil
7.	1. Muhammad Khafid 2. Mulyaningsih (2015)	Kontribusi Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Publikasi <i>Sustainability Report</i>	Variabel dependen: Publikasi <i>sustainability report</i> Variabel independen: Profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, dewan direksi, komite audit, 10. dan <i>governance committee</i>	Analisis Regresi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas, ukuran perusahaan dan <i>governance committee</i> berpengaruh positif terhadap publikasi <i>sustainability report</i> - <i>Leverage</i>, dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap publikasi <i>sustainability report</i>
8.	1. Korentina Juniasti Sinaga 2. Fachrurrozie 3. (2017)	<i>The Effect of Profitability, Activity Analysis, Industrial Type and Good Corporate Governance Mechanism on The Disclosure of Sustainability Report</i>	Variabel dependen: <i>Disclosure of sustainability report</i> Variabel independen: <i>Profitability, activity ratio, industrial type, audit committee, board of directors, dan independent commissioner</i>	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Industrial type</i> dan <i>board of directors</i> berpengaruh positif terhadap <i>disclosure of sustainability report</i> - <i>Profitability</i> berpengaruh negatif terhadap <i>disclosure of sustainability report</i> - <i>Audit committee</i> dan <i>Independent commissioner</i> tidak berpengaruh terhadap <i>disclosure of sustainability report</i>

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil
9.	1. Handre Diono 2. Tri Jatmiko Wahyu Prabowo (2017)	Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Variabel dependen: Pengungkapan <i>sustainability report</i> Variabel independen: Ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan komisaris perempuan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan	Analisis Regresi	-Ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan komisaris perempuan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> -Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>
10.	1. Astrid Rudyanto 2. Sylvia Veronica Siregar 3. (2018)	<i>The effect of stakeholder pressure and corporate governance on the quality of sustainability report</i>	Variabel dependen: <i>Sustainability report quality</i> Variabel independen: <i>Environment as the stakeholder, Consumers as the stakeholder, Employee as the stakeholder, Shareholders as the stakeholder, Board of commissioner, dan Family ownership</i> Variabel kontrol: <i>Firm</i>	Analisis Regresi Berganda	- <i>Consumers as the stakeholder, environment as the stakeholder, board of commissioner, profitability dan firm size</i> berpengaruh positif terhadap <i>Sustainability report quality</i> - <i>Employee as the stakeholder dan leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Sustainability report quality</i> - <i>Shareholders as the stakeholder dan family ownership</i> tidak berpengaruh

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil
			<i>size, leverage, profitability</i>		-terhadap <i>Sustainability report quality</i>
11.	1. Tricia Ong 2. Hadrian Geri Djajadikerta (2018)	<i>Corporate governance and sustainability reporting in the Australian resources industry: an empirical analysis</i>	Variabel dependen: <i>Total sustainability disclosures (economic, environmental, and social)</i> Variabel independen: <i>Independent directors, multiple directorship, dan female directors</i>	Analisis Regresi Linear	- <i>Independent directors, multiple directorship, dan female directors</i> berpengaruh positif terhadap <i>total sustainability disclosures</i>
12.	1. Yuana Jatu Nilawati 2. Elis Purwanti 3. Fithri Alvionita Nuryaman 3. (2018)	<i>The effect of stakeholders' pressure and corporate financial performance on transparency of sustainability report</i>	Variabel dependen: <i>Transparency of sustainability report</i> Variabel independen: <i>Environmental Sensitive Industry, Investor-Oriented Industry, dan Corporate Financial Performance</i>	Analisis Regresi Berganda	- <i>Environmental Sensitive Industry, Investor-Oriented Industry, dan Corporate Financial Performance</i> berpengaruh positif terhadap <i>Transparency of sustainability report</i>

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil
13.	1. Lucia 2. Rosinta Ria Panggabean (2018)	<i>The effect of firm's characteristic and corporate governance to sustainability report disclosure</i>	Variabel dependen: <i>Sustainability report disclosure</i> Variabel independen: <i>Profitability, leverage, liquidity, company size, board of director, dan audit committee</i>	Analisis Regresi Logistik	– <i>Profitability</i> dan <i>company size</i> berpengaruh positif terhadap <i>Sustainability report disclosure</i> – <i>Audit committee</i> berpengaruh negative terhadap <i>Sustainability report disclosure</i> – <i>Leverage, liquidity, dan board of director</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Sustainability report disclosure</i>
14.	1. Dipo Rizkika Alfaiz 2. Titik Aryati (2019)	Pengaruh Tekanan <i>Stakeholder</i> dan Kinerja Keuangan Terhadap Kualitas <i>Sustainability Report</i> dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi	Variabel dependen: Kualitas <i>sustainability report</i> Variabel independen: Tekanan lingkungan, tekanan karyawan, tekanan konsumen,	Analisis Regresi Berganda	– Tekanan karyawan dan tekanan konsumen berpengaruh positif terhadap kualitas <i>sustainability report</i>

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil
			tekanan pemegang saham, dan profitabilitas Variabel moderasi: komite audit		<ul style="list-style-type: none"> - Tekanan pemegang saham berpengaruh negatif terhadap kualitas <i>sustainability report</i> - Tekanan lingkungan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas <i>sustainability report</i> - Komite audit memperkuat pengaruh tekanan pemegang saham terhadap kualitas <i>sustainability report</i> - Komite audit memperlemah pengaruh tekanan karyawan dan tekanan konsumen terhadap kualitas <i>sustainability report</i> - Komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh tekanan lingkungan dan profitabilitas terhadap kualitas <i>sustainability report</i>

2.4. Kerangka Berpikir

2.4.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham (Khafid dan Mulyaningsih, 2015). Profitabilitas sering digunakan sebagai indikator pengelolaan perusahaan karena rasio ini menunjukkan efisiensi yang dilakukan manajemen. Ketika perusahaan mampu memperoleh laba yang tinggi maka kecukupan dana dalam perusahaan pun menjadi tinggi sehingga keberlangsungan usahanya dapat terjamin. Selain itu, laba juga merupakan indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya terhadap penyedia dana sehingga perusahaan dengan rasio profitabilitas tinggi biasanya akan lebih menarik perhatian investor dan kreditor.

Yoga (2014) menyatakan bahwa investor selalu memperhatikan tingkat profitabilitas karena hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan. Namun selain memenuhi harapan *shareholder* untuk mendapatkan *return* yang lebih besar, tingkat profitabilitas yang tinggi juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi secara lebih luas dan transparan. Khafid dan Mulyaningsih (2015) menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik akan lebih percaya diri dalam memberikan informasi kepada para *stakeholder* dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang kurang baik. Akibatnya, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan

sustainability report karena profitabilitas merupakan salah satu indikator yang wajib diungkapkan dalam *sustainability report*. Selain itu, profitabilitas juga dapat dipandang sebagai indikator pengelolaan suatu perusahaan sehingga perusahaan yang baik akan cenderung untuk meningkatkan transparansi informasi agar bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam teori legitimasi, perusahaan dituntut untuk senantiasa responsif terhadap lingkungan sekitarnya. Selain beroperasi dalam norma dan batas yang ada, perusahaan juga harus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat serta memenuhi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat agar dapat terus menjalankan usahanya (*going concern*). Akibatnya, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi hal yang cukup penting untuk dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan legitimasi. *Sustainability report* merupakan salah satu bentuk informasi perusahaan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terpisah dari *annual report*. Informasi dalam *sustainability report* ini juga mencakup segala dampak positif maupun negatif atas aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan serta bagaimana langkah perusahaan dalam mengelolanya. Bagi perusahaan, pengungkapan *sustainability report* dapat menjadi sarana tanggung jawab sosialnya kepada para pemangku kepentingan. Sedangkan bagi *stakeholder* adanya *sustainability report* diharapkan dapat membantu dan mendukung dalam pengambilan keputusan.

Pengungkapan *sustainability report* sebagai laporan yang terpisah dari *annual report* erat kaitannya dengan biaya yang akan dikeluarkan. Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Aniktia dan Khafid (2015) menyatakan bahwa keputusan

untuk melakukan pengungkapan informasi sosial akan diikuti oleh pengeluaran yang dapat mengurangi pendapatan. Oleh karena itu perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk akan cenderung tidak melakukan pengungkapan yang sifatnya *voluntary* untuk menghemat biaya sedangkan perusahaan dengan perolehan laba yang tinggi cenderung untuk melakukan pengungkapan karena ketersediaan dana.

Penelitian yang mendukung adanya pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report* dengan arah positif adalah penelitian yang dilakukan oleh Khafid dan Mulyaningsih (2015), Nilawati *et al.* (2018) dan Suryono dan Prastiwi (2011) yang artinya semakin tinggi rasio profitabilitas perusahaan, maka akan meningkatkan pengungkapan *sustainability report*nya. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Fachrurrozie (2017) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan Alfaiz dan Aryati (2019) dan Saputro *et al.* (2013) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Dari hasil pemaparan di atas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁ : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*

2.4.2. Pengaruh *Leverage* terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*

Leverage atau yang disebut juga sebagai solvabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan melakukan pemenuhan

sumber dana melalui utang (pinjaman). Ketika rasio *leverage* suatu perusahaan tinggi maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan sangat tergantung pada utang kepada pihak lain dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi tingkat *leverage*, maka risiko yang dihadapi perusahaan semakin besar sehingga kondisi keuangannya dianggap kurang sehat.

Khafid dan Mulyaningsih (2015) menyatakan bahwa para *stakeholder* akan lebih percaya dan merasa lebih aman menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan yang kondisi keuangannya sehat dan baik. Meskipun tingginya tingkat utang tidak selalu menunjukkan kinerja keuangan yang buruk, namun para penyedia dana akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Hal ini rasional mengingat risiko yang dihadapi perusahaan dengan rasio *leverage* tinggi lebih besar dibandingkan perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah. Jika perusahaan menggunakan lebih banyak utang dibanding modal sendiri, maka biaya modal yang ditanggung pun menjadi lebih besar. Kondisi ini dapat menurunkan laba perusahaan yang akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam memberikan *return* terhadap investor serta pemenuhan utang kepada kreditur.

Leverage digunakan untuk mengukur seberapa besar ketergantungan perusahaan pada kreditur dalam mengongkosi aset yang dimiliki (Trinanda *et al.*, 2018). Semakin tinggi rasionya, maka risiko finansial yang didapat juga semakin besar. Teori keagenan memperkirakan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti ini juga tinggi (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Trinanda *et al.*, 2018). Hal ini dilakukan untuk membuang

keraguan para pemegang obligasi atas dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur.

Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi cenderung mendapat *image* yang buruk dari *stakeholder* (baik investor maupun kreditur). Oleh karena itu untuk memperbaiki citra perusahaan di hadapan pemberi pinjaman, perusahaan akan lebih banyak mengungkapkan informasi terutama mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan kepada kreditur bahwa selain berfokus pada aktivitas bisnis, perusahaan juga peduli pada kehidupan di sekitarnya. Selain itu kreditur juga dapat melihat penggunaan atas dana yang mereka pinjamkan sehingga *image* buruk perusahaan dapat diperbaiki.

Leverage merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan *sustainability report* perusahaan. Semakin tinggi rasionya, maka informasi yang disampaikan pun akan semakin banyak. Kinantika (2013) dalam Handoyo dan Jakasurya (2017) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosialnya sebagai bentuk pengalihan isu atas tingginya utang yang mereka miliki. Dengan diterbitkannya *sustainability report* yang berkualitas, informasi yang akan diterima oleh investor dan kreditur pun akan seimbang sehingga asimetri informasi yang mungkin muncul antara manajer dengan *agent* dapat dihindari.

Aniktia dan Khafid (2015) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, *governance*

committee, profitabilitas, dan *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudyanto dan Siregar (2018) dimana hasilnya adalah *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Saputro *et al.* (2013) yang meneliti pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara tingkat *leverage* perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Dari pemaparan di atas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂ : *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*

2.4.3. Pengaruh *Customer Proximity Industries* terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*

Tujuan akhir dari proses produksi dalam sebuah perusahaan adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun orang lain dengan tujuan tidak untuk diperdagangkan. Karena merupakan sasaran utama, konsumen menjadi indikator penting dalam mengambil keputusan produksi.

Saat ini konsumen sudah semakin cerdas. Dalam melakukan keputusan pembelian, mereka tidak hanya melihat dari sisi kuantitas dan kualitas, namun juga mempertimbangkan *image* dari perusahaan yang memproduksi. Kondisi ini

memaksa perusahaan untuk senantiasa menerapkan strategi terbaik guna memenangkan persaingan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka menarik perhatian dan minat konsumen yaitu dengan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan sinyal kepada konsumen selaku *stakeholder* perusahaan bahwa dalam menghasilkan produk dan jasanya perusahaan telah melakukan dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan dampak yang ditimbulkan.

Alfaiz dan Aryati (2019) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kedekatan dengan konsumen akhir (*Customer Proximity Industries*) cenderung lebih diperhatikan konsumen. Pada perusahaan jenis ini, citra dan *image* perusahaan merupakan suatu hal yang penting dan dapat menentukan keberlangsungan usaha. Semakin dekat sebuah industri terhadap pelanggan, maka semakin besar pula tekanan yang akan didapat. Publikasi *sustainability report* akan memberikan *image* yang baik bagi perusahaan sehingga mampu menarik perhatian konsumen. Hal ini karena *sustainability report* tidak hanya memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan tetapi juga mengungkapkan bagaimana sumber daya diperoleh dan digunakan serta langkah perusahaan agar sumber daya tersebut tetap tersedia bagi generasi mendatang.

Perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen akhir cenderung menjaga citranya dengan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial. Kegiatan ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat sebagai konsumen bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa

perusahaan akan dapat beroperasi dengan izin masyarakat (Adhipradana dan Daljono, 2014). Namun izin tersebut hanya bersifat sementara sehingga perusahaan dituntut untuk memenuhi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan beroperasi dalam norma dan batas yang ada agar dapat terus menjalankan usahanya (*going concern*).

Penelitian Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) untuk menguji pengaruh tekanan *stakeholder* terhadap transparansi *sustainability report* menunjukkan bahwa perusahaan yang termasuk dalam industri yang memiliki kedekatan dengan konsumen akhir cenderung mengungkapkan *sustainability report* secara lebih transparan. Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Rudyanto dan Siregar (2018) dimana tekanan konsumen memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Namun berbeda dengan hasil penelitian Hamudiana dan Achmad (2017) yang menunjukkan bahwa *Customer Proximity Industries* tidak berpengaruh terhadap transparansi *sustainability report*. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃ : *Customer Proximity Industries* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*

2.4.4. Pengaruh *Employee-Oriented Industries* terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*

Karyawan merupakan bagian dari aset terpenting dalam sebuah perusahaan. Sebagai salah satu sumber daya utama, kinerja karyawan sangat berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Selain itu, karyawan juga berperan penting

dalam menciptakan inovasi dan meningkatkan daya saing perusahaan. Ketika perusahaan mampu memperlakukan karyawannya dengan baik, maka kepuasan bekerja akan mereka dapatkan sehingga berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan. Adanya kepuasan bekerja juga akan menurunkan tingkat perputaran kerja dalam sebuah perusahaan.

Semakin banyak karyawan, maka akan semakin banyak pula tuntutan yang didapat perusahaan. Hal ini sejalan dengan konsep *Employee-Oriented Industries* yang menyatakan bahwa perusahaan dengan jumlah karyawan yang tinggi cenderung memiliki tekanan yang lebih besar. Akibatnya, manajemen sebagai pihak pengelola perusahaan harus mampu memotivasi karyawannya agar memiliki keselarasan tujuan dengan perusahaan. Hal ini sangat penting mengingat karyawan merupakan sumber daya utama bagi perusahaan sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan harus selaras dengan sumber daya yang dimiliki.

Saat ini semakin banyak karyawan dan calon karyawan yang berkualitas. Selain memperhatikan bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya, mereka juga mempertimbangkan bagaimana perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Ketika *image* perusahaan baik, maka karyawan akan memiliki kebanggaan terhadap tempatnya bekerja. Tanggung jawab sosial merupakan salah satu bentuk kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Perusahaan perlu melakukan pengungkapan *sustainability report* guna meyakinkan karyawannya bahwa perusahaan tempat mereka bekerja merupakan perusahaan yang bertanggung jawab.

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa semakin banyak dan kuat posisi *stakeholder*, maka akan semakin besar kecenderungan perusahaan untuk meningkatkan transparansi informasi dalam laporan keberlanjutan. Ketika perusahaan mempublikasikan *sustainability report*, maka perusahaan harus sudah mengetahui tentang risiko dan dampak aktivitas bisnis yang dilakukan serta bagaimana langkah pengelolaannya. Adanya kegiatan ini akan menunjang keberlangsungan usaha perusahaan sehingga semakin meyakinkan karyawannya bahwa perusahaan akan terus beroperasi. Karyawan yang berkualitas akan memilih perusahaan yang memiliki prospek yang bagus ke depan dan perusahaan juga membutuhkan karyawan yang berkualitas agar terus *going concern*. Oleh karena itu perusahaan akan terus meningkatkan kegiatan tanggung jawab sosialnya melalui *sustainability report* agar tidak kehilangan karyawan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) menunjukkan bahwa industri yang berorientasi pada karyawan berpengaruh positif terhadap transparansi *sustainability report*. Hasil yang sama juga didapat oleh Alfaiz dan Aryati (2019) dimana tekanan karyawan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas *sustainability report*. Namun berbeda dengan hasil penelitian Rudyanto dan Siregar (2018) yang menyatakan bahwa industri berorientasi pada karyawan memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Dari pemaparan di atas, maka hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H₄ : *Employee-Oriented Industries* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*

2.4.5. Pengaruh *Environmentally Sensitive Industries* terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*

Eksplorasi sumber daya alam secara tak terkendali dengan tidak disertai restorasi ekosistem mengancam kebutuhan generasi yang akan datang serta menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Sebagian besar kasus rusaknya lingkungan ini diakibatkan oleh kegiatan korporasi yang tidak bertanggung jawab. Namun semenjak adanya isu mengenai pembangunan berkelanjutan, banyak perusahaan yang mulai melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Saat ini, kerusakan lingkungan merupakan kasus yang sering menjadi perhatian masyarakat umum. Tidak hanya itu, berbagai kelompok pecinta lingkungan pun ikut turut aktif dalam memberikan tuntutan bagi perusahaan-perusahaan yang aktivitas bisnisnya sensitif terhadap lingkungan (*Environmentally Sensitive Industries*) agar berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Menurut Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) lingkungan merupakan salah satu *stakeholder* bagi perusahaan yang kegiatan operasionalnya sensitif terhadap lingkungan. Adanya tuntutan dari berbagai pihak, membuat industri ini cenderung untuk melakukan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang mempunyai dampak lingkungan yang tinggi cenderung untuk mempublikasikan informasi secara lebih luas dan transparan. Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, transparansi informasi yang tinggi juga akan membantu perusahaan dalam mendapatkan legitimasi. Shamil *et al.* (2014) dalam Alfaiz dan Aryati (2019)

menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan tindakan yang dipandang perlu untuk mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan yang *legitimative*. Adanya pengungkapan *sustainability report* tidak hanya dijadikan strategi untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga sebagai wujud kesadaran yang dijiwai nilai-nilai etika dan moralitas.

Tekanan yang datang dari kelompok pecinta lingkungan dan masyarakat menuntut perusahaan untuk senantiasa responsif terhadap lingkungan sekitar. Perusahaan harus memperbaiki apa yang telah dirusak dan mengembalikan apa yang telah diambil agar persepsi masyarakat dapat berubah. Selain itu tekanan dari *stakeholder* agar perusahaan meningkatkan tanggung jawab sosialnya juga mendorong dipublikasikannya *sustainability report*. Karena selain digunakan sebagai sarana komunikasi, *sustainability report* juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) dan Nilawati *et al.* (2018) menunjukkan bahwa industri yang sensitif terhadap lingkungan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap *sustainability report*. Hal ini berarti semakin besar dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis perusahaan akan semakin mendorong dipublikasikannya *sustainability report*. Namun hasil yang berbeda diperoleh dalam penelitian Alfaiz dan Aryati (2019) yang meneliti pengaruh tekanan *stakeholder* dan kinerja keuangan terhadap kualitas *sustainability report* dimana industri yang sensitif lingkungan tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H₅ : *Environmentally Sensitive Industries* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*

2.4.6. Pengaruh *Investor-Oriented Industries* terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*

Investor merupakan individu atau pihak yang menanamkan modalnya dalam perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan *return*. Dalam perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, investor sering disebut sebagai pemegang saham atau *shareholder*. Tingkat kepemilikan mereka terhadap perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Maka ketika saham yang mereka miliki dijual, kepemilikan terhadap perusahaan pun akan hilang atau berkurang sejumlah saham yang dilepas.

Setiap perusahaan memiliki penyebaran kepemilikan saham yang berbeda-beda tergantung kebijakan manajemen. Ketika saham di suatu perusahaan sebagian besar dimiliki oleh satu individu atau institusi tertentu maka dapat dikatakan bahwa tingkat konsentrasi kepemilikannya tinggi. Perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi cenderung tidak mengalami asimetri informasi sedangkan perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang rendah cenderung memiliki asimetri informasi karena *stakeholdernya* semakin beragam.

Asimetri informasi dapat terjadi ketika penyebaran kepemilikan saham pada perusahaan tinggi sehingga informasi yang didapat oleh satu pihak dengan pihak lainnya berbeda atau tidak seimbang. Untuk meminimalkan terjadinya asimetri informasi, perusahaan harus meningkatkan transparansi informasi dengan melakukan pengungkapan secara lebih luas. Dengan diterbitkannya *sustainability*

report, informasi yang diterima oleh semua pemegang saham menjadi seimbang. Hal ini karena *sustainability report* tidak hanya memberikan informasi terkait kegiatan ekonomi, tetapi juga mengenai kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan.

Alfaiz dan Aryati (2019) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan saham yang rendah cenderung melakukan tanggung jawab sosial dengan lebih buruk karena cenderung tidak mendapat banyak tekanan dari *shareoldernya*. Informasi yang didapat oleh pemegang saham terkonsentrasi sudah menyeluruh karena jumlah mereka lebih sedikit sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dianggap tidak cukup penting. Namun sebaliknya, ketika penyebaran kepemilikan saham tinggi, maka pemegang saham akan semakin beragam sehingga tekanan yang diterima perusahaan pun akan lebih tinggi. Akibatnya *sustainability report* menjadi salah satu laporan yang harus diungkapkan untuk memenuhi harapan *shareholder* sebagai pemangku kepentingan utama dalam perusahaan.

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan dapat beroperasi ketika mendapat dukungan dari *stakeholdernya*. Dukungan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti meningkatkan transparansi informasi dan melaporkan tanggung jawab sosial. Kedua hal tersebut dapat dilakukan perusahaan melalui publikasi *sustainability report*. Informasi dalam *sustainability report* sangat dibutuhkan oleh investor untuk mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu untuk menarik perhatian dan dukungan dari investor, perusahaan akan

mempublikasikan *sustainability report* secara sukarela dan terpisah dari *annual report*.

Penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara industri berorientasi pada investor dengan pengungkapan *sustainability report* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) dan Nilawati *et al.* (2018). Sedangkan Alfaiz dan Aryati (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa industri berorientasi pada investor memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Berbeda dengan kedua hasil penelitian tersebut, hasil penelitian Rudyanto dan Siregar (2018) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara industri berorientasi pada investor terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Dari pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₆ : *Investor-Oriented Industries* berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*

2.4.7. Peran Proporsi Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh *Customer Proximity Industries* terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*

Pengungkapan *sustainability report* merupakan salah satu langkah perusahaan dalam mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder* dimana salah satunya adalah konsumen. Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa transparansi informasi dalam *sustainability report* berkaitan erat dengan kedekatan industri tersebut terhadap konsumen. Perusahaan yang memiliki kedekatan dengan konsumen akhir cenderung mengungkapkan informasi

secara lebih transparan dengan tujuan untuk menaikkan *brand image* perusahaan. Hal ini rasional mengingat saat ini telah banyak konsumen cerdas yang memperhatikan bagaimana produksi dari barang yang akan dikonsumsi sehingga setiap tindakan dan kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan harus sesuai dengan keinginan konsumen.

Teori legitimasi menyatakan bahwa untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, perusahaan harus beroperasi dalam batasan dan norma yang berlaku di masyarakat. Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan juga akan disesuaikan dengan tekanan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat menghasilkan respon positif serta legitimasi sosial (Rudyanto dan Siregar, 2018). Hal-hal yang dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat sebagai konsumen (*primary stakeholder*) akan dilakukan perusahaan demi keberlangsungan usahanya.

McWilliams dan Siegel (2001) dalam Rudyanto dan Siregar (2018) menyatakan bahwa perusahaan yang memproduksi barang yang dikonsumsi oleh konsumen akhir cenderung lebih diperhatikan daripada perusahaan yang memproduksi barang produksi. Hal ini karena konsumen akhir telah banyak diberikan informasi mengenai dampak atas produk yang mereka gunakan sehingga mereka lebih peduli terhadap lingkungan. Ini yang kemudian mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosialnya. Semakin banyak pengungkapan yang dilakukan, informasi yang diterima oleh konsumen pun semakin luas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan mereka dalam memilih barang yang akan dikonsumsi.

Sustainability report merupakan sarana bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan para *stakeholdernya*. Keberadaan komisaris independen sebagai organ GCG akan mendukung publikasi *sustainability report* secara lebih transparan dan luas. Tidak adanya hubungan afiliasi antara komisaris independen dengan Direksi, pemegang saham mayoritas ataupun anggota dewan komisaris lainnya akan meningkatkan keindependennya dalam memberikan saran dan nasihat kepada Direksi serta dalam menelaah dan meneliti berbagai laporan tahunan yang telah disiapkan oleh Direksi. Dalam hal ini, *sustainability report* merupakan salah satu jenis laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungannya terhadap berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (investor, kreditur, konsumen, masyarakat).

Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh tekanan *stakeholder* terhadap transparansi *sustainability report* dimana hasil menunjukkan bahwa *Customer Proximity Industries* berpengaruh terhadap transparansi dari laporan keberlanjutan yang dipublikasikan perusahaan. Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Rudyanto dan Siregar (2018) dimana *consumer as stakeholder* memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hamudiana dan Achmad (2017) menunjukkan bahwa *consumer proximity industry* tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Adanya ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk memunculkan variabel moderating berupa proporsi komisaris independen yang diduga berperan dalam memperlemah ataupun

memperkuat pengaruh *Customer Proximity Industries* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian Diono dan Prabowo (2017) dan Ong dan Djajadikerta (2018) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₇ : Proporsi komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *Customer Proximity Industries* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*

2.4.8. Peran Proporsi Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh *Employee-Oriented Industries* terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*

Praktik pengungkapan *sustainability report* merupakan sarana bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Di dalamnya termuat informasi mengenai kinerja ekonomi, sosial serta lingkungan yang diungkapkan secara transparan dan detail. Selain itu, tanggung jawabnya terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam keberlangsungan usaha perusahaan, terutama karyawan juga disertakan. Rudyanto dan Siregar (2018) menyatakan bahwa saat ini karyawan dan calon karyawan memperhatikan apakah perusahaan tempatnya bekerja merupakan perusahaan yang bertanggung jawab atau tidak. Karyawan yang berkualitas telah mengerti akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan sehingga hal ini dapat menjadi kriteria untuk menetap atau meninggalkan suatu pekerjaan.

Saat ini, sumber daya manusia atau *intellectual capital* merupakan asset paling berharga bagi perusahaan. Kehilangan karyawan yang berkualitas akan menyebabkan guncangan pada kegiatan operasional perusahaan sehingga untuk menghindari hal tersebut, perusahaan harus memenuhi tuntutan karyawan untuk melakukan tanggung jawab sosial. Penelitian Sun dan Yu (2015), Huang dan Kung (2010), Betts, Wiengarten, dan Tadisina (2015), Turban dan Greening (1997), Campbell (2007) menyatakan bahwa karyawan yang bekerja pada perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang tinggi cenderung bekerja dengan lebih baik daripada karyawan yang bekerja di perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Rudyanto dan Siregar, 2018).

Perusahaan dengan jumlah karyawan yang tinggi cenderung memiliki tekanan yang tinggi pula dari para karyawannya. Alfaiz dan Aryati (2019) berpendapat bahwa jumlah pegawai yang besar merupakan modal utama untuk bernegosiasi dengan manajemen agar lebih terbuka atas keadaan sosial dan budaya dalam perusahaan. Berdasarkan teori *stakeholder*, pekerja merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan yang signifikan dalam mempengaruhi berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan jumlah karyawan yang besar akan cenderung lebih bertanggung jawab secara sosial maupun lingkungan karena adanya *pressure* dari *stakeholder* internal perusahaan (karyawan).

Keberadaan komisaris independen dapat membantu terciptanya pengungkapan serta sistem pengendalian yang baik. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka akan semakin baik dan berkualitas pula informasi yang

disampaikan perusahaan. Komisaris independen memiliki wewenang untuk memberikan saran dan nasihat kepada Direksi yang berkaitan dengan strategi perseroan. *Sustainability report* merupakan salah satu bentuk strategi untuk mempertahankan kepercayaan dan dukungan dari *stakeholder* agar keberlangsungan usaha perusahaan dapat terjamin.

Penelitian yang dilakukan oleh Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) dan Alfaiz dan Aryati (2019) menunjukkan bahwa industri yang berorientasi pada karyawan berpengaruh positif terhadap transparansi *sustainability report*. Namun berbeda dengan hasil penelitian Rudyanto dan Siregar (2018) yang menyatakan bahwa industri berorientasi pada karyawan memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Perbedaan pada hasil penelitian tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk memunculkan variabel moderating berupa proporsi komisaris independen yang diduga mampu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh *Employee-Oriented Industries* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₈ : Proporsi komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *Employee-Oriented Industries* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*

2.4.9. Peran Proporsi Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh *Environmentally Sensitive Industries* terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*

Aktivitas bisnis perusahaan dan kelestarian lingkungan merupakan dua hal yang berkaitan erat. Semakin tinggi kapasitas produksi yang dilakukan perusahaan, maka semakin besar pula risiko kerusakan lingkungan yang akan dihadapi. Menurut teori legitimasi, perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan cenderung untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara lebih transparan. Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, transparansi informasi yang tinggi juga akan membantu perusahaan dalam mendapatkan legitimasi sehingga keberlangsungan usahanya dapat terjamin.

Environmentally Sensitive Industries (ESI) merupakan jenis industri yang berkontribusi besar terhadap rusaknya lingkungan sekitar. Baik karena bahan baku yang digunakan, proses produksi yang dilakukan ataupun karena limbah yang dihasilkan. Perusahaan yang tergolong dalam ESI sering mendapat tekanan dari berbagai kelompok masyarakat karena memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan. Tekanan tersebut kemudian menuntut perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak atas aktivitas bisnis yang dilakukan. Gamerschlag *et al.* (2011) dalam Hamudiana dan Achmad (2017) berpendapat bahwa perusahaan yang berada di bawah tekanan kelompok lingkungan cenderung mengungkapkan CSR secara lebih. Kenaikan atas pengungkapan CSR tersebut merupakan strategi perusahaan untuk menghilangkan persepsi buruk masyarakat atas dampak lingkungan yang diakibatkan. Dengan diterbitkannya *sustainability report* sebagai

laporan yang terpisah dari *annual report*, informasi CSR yang disampaikan kepada *stakeholder* pun menjadi lebih luas dan transparan.

Pengungkapan *sustainability report* tidak hanya dipengaruhi oleh jenis industri yang dijalankan perusahaan. Namun keberadaan komisaris independen sebagai pengawas Direksi juga dapat mempengaruhi praktik pengungkapannya. Sebagai dewan yang dibentuk dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik, komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan transparansi informasi. Semakin tinggi proporsinya, maka pengaruh yang diberikan pun akan semakin besar. Hal ini rasional mengingat komisaris independen merupakan wakil dari seluruh *stakeholder* dalam memberikan saran dan nasihat kepada Direksi, terutama yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk *sustainability report*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) dan Nilawati *et al.* (2018) menunjukkan bahwa *Environmentally Sensitive Industries* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap transparansi *sustainability report*. Namun hasil yang berbeda diperoleh dalam penelitian Alfaiz dan Aryati (2019) yang meneliti pengaruh tekanan *stakeholder* dan kinerja keuangan terhadap kualitas *sustainability report* dimana industri yang sensitif lingkungan tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Adanya ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian menjadi dasar bagi peneliti untuk memunculkan variabel moderating berupa proporsi komisaris independen. Penelitian yang dilakukan Diono dan Prabowo (2017) dan Ong dan Djajadikerta (2018) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh secara positif signifikan terhadap

pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H₉: Proporsi komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *Environmentally Sensitive Industries* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*

2.4.10. Peran Proporsi Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh

Investor-Oriented Industries* terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report

Investor merupakan pihak yang melakukan investasi dana ke dalam perusahaan dengan tujuan untuk untuk mendapatkan imbal balik berupa keuntungan. Karena memiliki minat terhadap kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang, seorang investor cenderung mengambil keputusan yang dapat memaksimalkan tindakan ekonomi, sosial dan lingkungan agar reputasi perusahaan tetap terjaga (Hamudiana dan Achmad, 2017). Pengungkapan *sustainability report* merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan investor karena di dalamnya memuat berbagai informasi penting mengenai kinerja dan tanggung jawab perusahaan.

Bagi perusahaan yang kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada beberapa pihak, pengungkapan *sustainability report* cenderung tidak dilakukan. Hal ini rasional mengingat perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan saham yang rendah cenderung memiliki tekanan yang rendah pula dari investornya (Rudyanto dan Siregar, 2018). Terkonsentrasinya kepemilikan saham akan

meminimalisir terjadinya asimetri informasi sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak perlu dilakukan. Namun sebaliknya, bagi perusahaan yang penyebaran kepemilikan sahamnya tinggi, tekanan yang datang dari investor pun cenderung tinggi. Akibatnya, pengungkapan *sustainability report* menjadi penting untuk dilakukan guna meminimalisir terjadinya asimetri informasi.

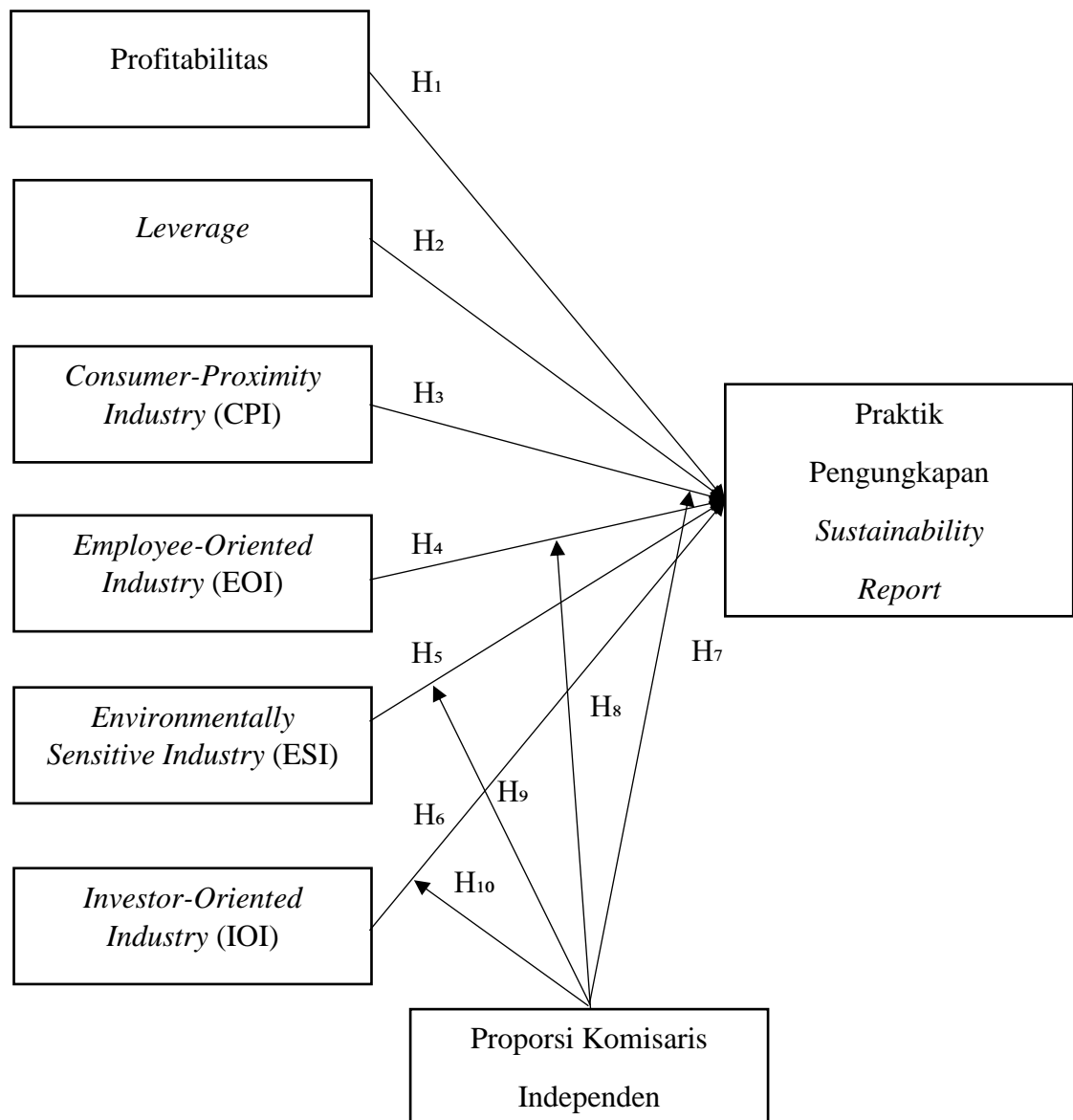
Berdasarkan teori *stakeholder*, semua informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan berhak diketahui oleh para pemangku kepentingan dalam perusahaan. Informasi tersebut dapat berupa informasi yang sifatnya wajib (*mandatory*) maupun informasi yang bersifat sukarela (*voluntary*). Hal ini sejalan dengan pernyataan Fatchan dan Trisnawati (2016) bahwa organisasi akan memilih untuk mengungkapkan informasi mengenai kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka secara sukarela melebihi dan di atas permintaan wajibnya untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya ataupun yang diharapkan oleh *stakeholder*, terutama bagi perusahaan yang memiliki tekanan tinggi dari investor. Namun sebaliknya, bagi perusahaan yang tekanan dari investornya cenderung ringan, hal tersebut dianggap tidak perlu dilakukan karena hanya akan menambah pengeluaran perusahaan.

Sustainability report adalah laporan yang tidak hanya digunakan sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga untuk proses eksplorasi, konstruksi, modifikasi, dan negosiasi dengan pemangku kepentingan (Christensen dan Cheney, 2011, Gomez dan Chalmeta, 2013 dalam Rudyanto dan Siregar, 2018). Berkaitan dengan hal tersebut, komisaris independen merupakan organ perusahaan yang dapat mendukung dipublikasikannya *sustainability report*. Karena tidak terafiliasi dengan

perusahaan, keberadaan komisaris independen dianggap dapat menyeimbangkan kepentingan dari seluruh *stakeholder*. Dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Direksi, terutama yang berkaitan dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan, komisaris independen harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memihak hanya kepada salah satu pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen diharapkan dapat mendukung manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi dalam laporan keberlanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fernandez-Feijoo *et al.* (2014) dan Nilawati *et al.* (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara *Investor-Oriented Industries* dengan pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan penelitian Alfaiz dan Aryati (2019) menemukan bahwa *Investor-Oriented Industries* memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berbeda dengan kedua hasil penelitian tersebut, hasil penelitian Rudyanto dan Siregar (2018) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara *Investor-Oriented Industries* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian yang tidak konsisten mengindikasikan bahwa terdapat variabel lain yang memoderasi pengaruh *Investor-Oriented Industries* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*. Pembahasan di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk memunculkan proporsi komisaris independen sebagai variabel yang dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh *Investor-Oriented Industries* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*. Dari pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁₀ : Proporsi komisaris independen dapat memoderasi secara signifikan pengaruh *Investor-Oriented Industry* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disajikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H₁ : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*
- H₂ : *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*
- H₃ : *Customer-Proximity Industry* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*
- H₄ : *Employee-Oriented Industry* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*
- H₅ : *Environmentally Sensitive Industry* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*
- H₆ : *Investor-Oriented Industry* berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*
- H₇ : Proporsi komisaris independen dapat memoderasi secara signifikan pengaruh *Customer-Proximity Industry* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*
- H₈ : Proporsi komisaris independen dapat memoderasi secara signifikan pengaruh *Employee-Oriented Industry* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*

- H₉ : Proporsi komisaris independen dapat memoderasi secara signifikan pengaruh *Environmentally Sensitive Industry* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*
- H₁₀ : Proporsi komisaris independen dapat memoderasi secara signifikan pengaruh *Investor-Oriented Industry* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya, simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diketahui bahwa nilai rata-rata pengungkapan *sustainability report* pada 106 perusahaan adalah sebesar 0,283236 dengan standar deviasi sebesar 0,1486561. Hasil menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata sehingga dapat disimpulkan bahwa simpangan data pengungkapan *sustainability report* dalam penelitian ini relatif kecil.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa *leverage* dan *Investor-Oriented Industry* berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio utang yang tinggi serta perusahaan dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi berusaha mendapatkan kepercayaan *stakeholder* melalui transparansi informasi dalam *sustainability report*.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa profitabilitas, *Consumer-Proximity Industry*, *Employee-Oriented Industry*, dan *Environmentally Sensitive Industry* tidak berpengaruh terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*. Hal ini terjadi karena kegiatan tanggung jawab sosial

dan lingkungan erat kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan sehingga perusahaan memilih tidak melakukannya untuk menghemat biaya.

4. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa proporsi komisaris independen mampu memperlemah pengaruh *Environmentally Sensitive Industry* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*. Hal ini karena adanya intervensi yang diberikan oleh komisaris independen kepada pihak manajemen agar menggunakan laba untuk kegiatan yang memberikan keuntungan ekonomi daripada kegiatan sosial dan lingkungan.
5. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa proporsi komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *Consumer-Proximity Industry*, *Employee-Oriented Industry*, serta *Investor-Oriented* terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*. Hal ini terjadi karena komisaris independen lebih menerapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan dalam perusahaan sehingga pengawasan terhadap kinerja sosial dan lingkungan tidak dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan indeks GRI dalam mengukur praktik pengungkapan *sustainability report* sehingga hasil yang didapat tidak menunjukkan kualitas pengungkapannya. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan atau menambah pengukuran lain untuk menilai praktik

pengungkapan *sustainability report* seperti ada tidaknya *Assurance Statement* dari pihak yang independen, jenis pengungkapan yang dilakukan, serta jumlah halaman *sustainability report*.

2. Hasil menunjukkan nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini hanya sebesar 5,4%. Artinya sebesar 94,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lain seperti *good corporate governance* dan struktur kepemilikan.
3. Dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2016-2018, hanya sebesar 6,9% perusahaan melakukan publikasi *sustainability report* secara terpisah dari *annual report*. Mengingat pentingnya *sustainability report* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, perusahaan-perusahaan di Indonesia diharapkan melakukan pengungkapan *sustainability report* secara terpisah dari *annual report* agar informasi yang disampaikan lebih detail dan transparan. Selain itu manajemen juga diharapkan lebih memperhatikan tingkat pengungkapan informasi dalam *sustainability report* karena hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang mengungkapkan informasi dalam *sustainability report* di bawah rata-rata adalah sebanyak 57% dari total sampel yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhipradana, F., & Daljono. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(1), 80–91.
- Afsari, R., Purnamawati, I. G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Luas Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris Perusahaan yang Mengikuti ISRA Periode 2013-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 8(2).
- Alfaiz, D. R., & Aryati, T. (2019). Pengaruh Tekanan Stakeholder dan Kinerja Keuangan Terhadap Kualitas Sustainability Report dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 2(2), 112–130.
- Amran, A., Lee, S. P., & Selvaraj, S. (2013). The Influence of Governance Structure and Strategic Corporate Social Responsibility Toward Sustainability Reporting Quality. *Business Strategy and the Environment*, 23(4), 217–235.
- Anggraini, F. R. R. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta). *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, 1–21.
- Aniktia, R., & Khafid, M. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1–10.
- Barung, M., Simanjuntak, A. M. A., & Hutadjulu, L. Y. (2018). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris Pada Seluruh Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(2), 76–89.
- Branco, M. C., Delgado, C., Gomes, S. F., & Eugenio, T. C. P. (2014). Factors Influencing the Assurance of Sustainability Reports in the Context of the Economic Crisis in Portugal. *Managerial Auditing Journal*, 29(3), 237–252.
- Budirahardjo, Renaldo. (2019). *Dilema Sustainability Report Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. <http://news.unika.ac.id/2019/06/dilema-sustainability-reportuntuk-pembangunan-berkelanjutan/>. (Diunduh tanggal 15 Desember 2019).
- Damanik, L. Y. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Kuantitas dan Kualitas Pengungkapan Sustainability Report di

- Indonesia Periode 2013-2015. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 10(2), 228–246.
- Dananjaya, D. G. Y., & Ardiana, P. A. (2016). Proporsi Dewan Komisaris sebagai Pemoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional pada Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1595–1622.
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures ± a theoretical foundation. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 15(3), 282–311.
- Dewi, S. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sustainability Report serta Dampaknya kepada Nilai Perusahaan. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, 7(3), 173–186.
- Dilling, P. F. A. (2010). Sustainability Reporting In A Global Context : What Are The Characteristics Of Corporations That Provide High Quality Sustainability Reports – An Empirical Analysis. *International Business & Economics Research Journal*, 9(1), 19–30.
- Diono, H., & Prabowo, T. J. W. (2017). Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–10.
- Elkington, J. (1998). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st-Century Business. *Environmental Quality Management*, 8(1), 37–51.
- Erica, D. (2018). Analisa Rasio Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan PT Kino Indonesia Tbk. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 12–20.
- Farida, Y. N., Prasetyo, Y., & Herwiyanti, E. (2010). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Timbulnya Earnings Management dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 12(2), 69–81.
- Fernandez-Feijoo, B., Romero, S., & Ruiz, S. (2014). Effect of Stakeholders ' Pressure on Transparency of Sustainability Reports within the GRI Framework. *Journal of Business Ethics* 122, 53–63.
- Halim, Devina. (2019). *Dirut dan Manajer Operasional PT SSS Jadi Tersangka Karhutla di Riau*. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/10/08/19405671/dirut-dan-manajer-operasional-pt-sss-jadi-tersangka-karhutla-di-riau>. (Diunduh tanggal 2 Oktober 2020).
- Hamudiana, A., & Achmad, T. (2017). Pengaruh Tekanan Stakeholder Terhadap Transparansi Laporan Keberlanjutan Perusahaan-perusahaan di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 1–11.
- Handoyo, S., & Jakasurya, T. (2017). Analisa Variabel yang Mempengaruhi

- Pengungkapan Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 11(2), 178–187.
- Hardika, A. L., Manurung, D. T. H., & Mulyati, Y. (2018). Corporate Governance Mechanism , Company Size Financial Performance and Sustainability Reporting. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(4.34), 201–203.
- Hasanah, N., Syam, D., & Jati, A. W. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 711–720.
- Hastuti, S. (2016). Kebijakan Hutang, Kepemilikan Saham Manajerial, dan Penguasaan Saham Investor Institusi dalam Perspektif Teori Agency. *Jurnal Ilmiah*, 24(1), 17–28.
- Herawati, T. (2013). Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen*, 2(2), 1–18.
- Idah. (2013). Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan dalam Pengungkapan Sustainability Report. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 314–322.
- Indonesia, Greenpeace. (2019). *Laporan Greenpeace Terbaru: Perusahaan Multinasional Menjalankan Solusi Palsu*. www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/3853/laporan-greenpeace-terbaru-perusahaan-multinasional-menjalankan-solusi-palsu/. (Diunduh tanggal 15 Desember 2019).
- Iriyanto, F. N., & Nugroho, P. I. (2014). Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report dan Kinerja Ekonomi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 46–57.
- Jabarekspres.com. (2020). *Pabrik Tekstil di Cimahi Terbukti Buang Limbah, PN Bale Bandung Putuskan Bayar Ganti Rugi Rp 4,2 Miliar*. <https://www.google.com/amp/s/jabarekspres.com/2020/pabrik-tekstil-di-cimahi-terbukti-buang-limbah-pn-bale-bandung-putuskan-bayar-ganti-rugi-rp-42-miliar/amp>. (Diunduh tanggal 2 Oktober 2020).
- Jati, Framudyo. (2009). Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Karlina, W., Mulyati, S., & Putri, T. E. (2019). The Effect of Company Size, Industrial Type, Profitability, and Leverage to Sustainability Report Disclosure (Case Study On Companies Registered In Sustainability Reporting Award (SRA) Period 2014-2016). *Jurnal of Accounting for Sustainable Society (JASS)*, 1(1), 32–52.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Khafid, M., & Mulyaningsih. (2015). Kontribusi Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Publikasi Sustainability Report. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 19(3), 340–359.
- Lucia, L., & Panggabean, R. R. (2018). The Effect of Firm's Characteristic and Corporate Governance to Sustainability Report Disclosure. *Social Economics and Ecology International Journal*, 2(1), 18–28.
- Madona, Muly Adra. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Marwati, C. P., & Yulianti. (2015). Analisis Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan Non-keuangan Tahun 2009-2013. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), 167–181.
- Nabila, A., & Daljono. (2013). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), 1–10.
- Nilawati, Y. J., Purwanti, E., & Nuryaman, F. Al. (2018). The Effect of Stakeholders' Pressure and Corporate Financial Performance on Transparency of Sustainability Report. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), 225–238.
- Novitaningrum, F., & Amboningtyas, D. (2017). Analysis of Good Corporate Governance Principles (Institutional Ownership, Managerial Ownership, Independent Commissioners, And Audit Committee) To Disclosure Sustainability Report Through Roa As Moderating Variables (Study on Manufacturing Companies of V. *Journal of Management*, 3(3), 0–14.
- Nurhayati, R., Brown, A., & Tower, G. (2006). Understanding the Level of Natural Environment Disclosures by Indonesian Listed Companies. *Journal of the Asia Pacific Centre for Environmental Accountability*, 12(3), 4–11.
- Nurrahman, A., & Sudarno. (2013). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), 1–13.
- Ong, T., & Djajadikerta, H. G. (2018). Corporate governance and sustainability reporting in the Australian resources industry : an empirical analysis. *Social Responsibility Journal*, 16(1), 1–14.
- Orniati, Y. (2009). Laporan Keuangan sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 14(3), 206–213.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. 2017.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.* 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.* 2016.
- Ortas, E., & Gallego-alvarez, I. (2014). Financial Factors Influencing the Quality of Corporate Social Responsibility and Environmental Management Disclosure: A Quantile Regression Approach. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*.
- Pratama, A., & Yulianto, A. (2015). Faktor Keuangan dan Corporate Governance Sebagai Penentu Pengungkapan Sustainability Report. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 1–10.
- Rambe, M. F. (2013). Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 13(01), 85–97.
- Rizki, Mochamad Januar. (2019). *Respons KLHK Soal Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Freeport*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c35f52adc2c8/respons-klhk-soal-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-freeport?page=all>. (Diunduh tanggal 15 Desember 2019).
- Rokhimah, Nur. (2018). Determinan Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.
- Rokhlinasari, S. (2015). Teori –Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 7(1), 1–11.
- Rudyanto, A., & Siregar, S. V. (2018). The effect of stakeholder pressure and corporate governance on the quality of sustainability report. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(2), 233–249.
- Saputro, D. A., Fachrurrozie, & Agustina, L. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(4), 480–488.
- Sarjono, H., & Julianita, W. (2013). *SPSS vs LISREL*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sartono, R Agus. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi 4*. Yogyakarta: BPF.
- Shamil, M. M., Shaikh, J. M., Ho, P., & Krishnan, A. (2014). The Influence of Board Characteristics on Sustainability Reporting Empirical Evidence from Sri Lankan Firms. *Asian Review of Accounting*, 22(2), 78–97.
- Sinaga, K. J., & Fachrurrozie. (2017). The Effect of Profitability , Activity Analysis

- , Industrial Type and Good Corporate Governance Mechanism on The Disclosure of Sustainability Report. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 347–358.
- Solikhah, B., & Kuswoyo, A. (2019). Kualitas Pengungkapan CSR pada Perusahaan LQ45 dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 16(1), 41–53.
- Solikhah, B., & Winarsih, A. M. (2016). Pengaruh Liputan Media, Kepekaan Industri, dan Struktur Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(1), 1–22.
- Sudarsi, S. (2008). Dampak Kepemilikan Managerial, Large External Shareholders terhadap Struktural Modal dalam Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 15(1), 15–30.
- Suharyani, R., Ulum, I., & Jati, A. W. (2019). Pengaruh Tekanan Stakeholder dan Corporate Governance Terhadap Kualitas Sustainability Report. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 71–92.
- Sulistiyawati, A. I., & Qadriatin, A. (2018). Pengungkapan Sustainability Report dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *Majalah Ilmiah Solusi*, 16(4), 1–22.
- Suryono, H., & Prastiwi, A. (2011). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance (GC) terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report (SR). *Simposium Nasional Akuntansi XIV*, 1-32. Aceh.
- Susanti, L., & Alvita, A. (2019). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, XI(2), 54–74.
- Sutama, D. R., & Lisa, E. (2018). Pengaruh Leverage dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, X(1), 21–39.
- Trinanda, S. M., Yahdi, M., & Rizal, N. (2018). Analisis Pengaruh Size, Profitabilitas dan Leverage terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016). *Progress Conference*, 1(1), 360–371.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. 2016.
- Utami, Larasati Dyah. (2020). *Ditjen Gakkum KLHK Tangkap Dirut PT NTS Terkait Kasus Pencemaran Lingkungan di Bekasi*. <https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/nasional/2020/02/05/ditjen-gakkum-klhk-tangkap-dirut-pt-nts-terkait-kasus-pencemaran-lingkungan-di-bekasi>. (Diunduh tanggal 2 Oktober 2020).

- Utami, W. (2015). Financial Performance and the Quality of Sustainability Disclosure Based on Global Reporting Initiative : Value Relevances Study in Indonesia Stock Exchange. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(5), 243–248.
- Wibowo, A., & Wartini, S. (2012). Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas dan Leverage Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 3(1), 49–58.
- Yi, T. F., & Yu, C. K. (2010). Research on Sustainability Reporting in Hong Kong. *Skripsi, Hong Kong*(April).
- Yoga, I. (2014). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2011-2014. *Jurnal EKA CIDA*, 1(1), 66–79.